



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



RENCANA STRATEGIS 2025-2029 POLITEKNIK NEGERI BANGKA BELITUNG

Kawasan Industri Air Kantung
Sungailiat, kab.Bangka,
Prov.Kep.Bangka Belitung
Telp.0717 -93586 ; Faks 0717-93586

www.polman-babel.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Polman Babel tahun 2025 – 2029 yang telah menyesuaikan dengan renstra Kemdiktisaintek dapat diselesaikan dengan baik.

Maksud dari penyusunan renstra ini adalah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Polman Babel dalam waktu lima tahun ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, dan kebutuhan bersama untuk dijadikan pedoman agar setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap unsur penyelenggara (jurusan, program studi, dan unit penunjang) merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan ini. Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan Polman Babel, Renstra ini harus menjadi komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara. Renstra ini juga perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih bersifat operasional.

Atas nama pimpinan Polman Babel saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras dalam penyusunan Renstra Polman Babel tahun 2025 – 2029 ini. Semoga pemikiran yang telah diberikan dapat membawa Polman Babel ke arah perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sungailiat, Januari 2026
Direktur

I Made Andik Setiawan, M.Eng., Ph.D.
NIP. 197307032012121003

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I. Pendahuluan.....	8
1.1 Kondisi Internal	9
1.1.1 Tata Pamong & Tata Kelola.....	9
1.1.2 Sumber Daya Manusia	14
1.1.3 Program Studi dan Mahasiswa	15
1.1.4 Keuangan, Sarana, dan Prasarana	17
1.1.5 Sistem Informasi	19
1.1.6 Penelitian & Pengabdian.....	21
1.1.7 Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi.....	22
1.2 Kondisi Eksternal.....	24
1.2.1. Megatrend Dunia 2045.....	24
1.2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) - Sustainable Development Goals (SDGs)	35
1.3 Analisis SWOT & Permasalahan.....	40
1.3.1. Hasil Analisis SWOT.....	40
1.3.2. Analisis Akar Masalah Utama.....	42
1.3.3. Alternatif Kegiatan untuk Pengembangan.....	44
BAB II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	46
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Presiden dan Kemdiktisaintek.....	46
2.1.1. Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	47
2.1.2. Misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	52
2.1.3. Tujuan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	56
2.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.....	61
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	72
2.2.1. Visi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	72
2.2.2. Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.....	72

2.2.3.	Tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	73
2.2.4.	Sasaran Strategis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	75
BAB III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan		
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	78
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	83
3.3.	Kerangka Regulasi	87
3.4.	Kerangka Kelembagaan	89
3.5.	Sasaran dan Strategi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	90
3.5.1.	Peningkatan APK, Kualitas dan Jumlah Lulusan.....	90
3.5.2.	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan..	92
3.5.3.	Meningkatkan Peringkat Akreditasi Institusi dan Program Studi	94
3.5.4.	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	95
3.5.5.	Meningkatkan Kualitas dan Keluaran Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	97
3.5.6.	Meningkatkan Tata Kelola Yang Baik Dan Berkualitas Sebagai Perwujudan Good University Governance	98
3.6.	Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi	99
3.7.	Transformasi Pendidikan Tinggi Vokasi.....	100
3.8.	Transformasi PTN Satker menjadi PTN BLU	101
BAB IV. Target dan Indikator Kinerja		
4.1.	Target dan Indikator Kinerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	102
4.2.	Target dan Indikator Kinerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.....	106
Referensi		123



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**
Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG
NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2025-2029
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pengembangan, diperlukan penyusunan rencana strategis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Rencana Strategis 2025-2029 Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Pendidikan. Kebudayaan. Riset. dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79780/M/06/2024 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 500/M/2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen Dan Kriteria Publikasi Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2025-2029 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Polman Babel adalah singkatan dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Renstra Polman Babel Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Polman Babel Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 06 Januari 2026

DIREKTUR POLITEKNIK
MANUFaktur NEGERI BANGKA
BELITUNG



I MADE ANDIK SETIAWAN
NIP 197307082012121003

BAB I. Pendahuluan

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung merupakan Politeknik yang awalnya didirikan oleh PT. Timah Tbk pada tahun 1994 dengan nama Politeknik Manufaktur Timah atau disingkat menjadi Polman Timah. Politeknik ini bernaung di bawah Yayasan Polman Timah dengan asistensi dari Politeknik Maunfaktur Bandung. Pada awal berdirinya Polman Timah memiliki tiga jurusan, Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, Perawatan dan Perbaikan Mesin, dan Perancangan Mekanik. Seiring dengan perjalannya dan peraturan tentang nomenklatur saat itu, jurusan Otomasi Manufaktur dan Mekatronika diubah namanya menjadi Elektronika Konsentrasi Instrumentasi dan Kendali. Sedangkan isinya masih tetap seperti awal didirikan.

Pada tahun 2005, Polman Timah beserta Sekolah Tinggi Teknik Pahlawan 12 dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian yang berada di Kabupaten Bangka mengusulkan pendirian Universitas Bangka Belitung (UBB). Selanjutnya setelah UBB berdiri, Polman Timah dan UBB mendapatkan status sebagai PTN pada tahun 2010. Polman Timah kemudian dikenal menjadi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang tertuang di dalam Permendiknas nomor 25 tahun 2010.

Sejak saat itu Polman Babel memiliki dua jurusan, yaitu Teknik Elektronika dan Informatika, dan Teknik Mesin. Jurusan Teknik Elektronika dan Informatika menaungi prodi D3 Teknik Elektronika, sedangkan Jurusan Teknik Mesin D3 memiliki prodi Teknik Perawatan Mesin dan Teknik Perancangan Mekanik. Sejak menjadi PTN, Polman Babel mencoba melakukan pengembangan-pengembangan. Setelah melalui beberapa tahapan proses, pada tahun 2017 Polman Babel memiliki prodi baru yaitu prodi D4 Teknik Elektronika di jurusan Teknik Elektronika dan Informatika, dan prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur di jurusan Teknik Mesin. Setahun kemudian Polman Babel mendapatkan izin untuk menjalankan prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Seiring dengan pengembangan-pengembangan baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dicapai, Polman Babel semestinya memiliki panduan di dalam mencapai rencana-rencana di masa yang akan datang.

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Manufaktur (Polman) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra ini merupakan suatu penjabaran visi & misi Pomanbabel yang merupakan prioritas kerja Direktur Polman.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai arahan kebijakan dalam penyusunan program-program dan kegiatan serta sebagai arahan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan Polman. Renstra tahun 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan perkembangan Polman Babel sampai dengan kondisi-kondisi Polman Babel pada saat renstra disusun serta isu-isu strategis yang melingkupi perkembangan Polman pada masa lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah program kerja

pemerintah, rencana strategis Kemdikbud dan berbagai perundangan yang berlaku pada saat renstra ini disusun.

Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program. Untuk mengukur ketercapaian program yang tertuang, di dalam renstra telah termaktub indikator kinerja program serta sumber-sumber daya yang diperlukan. Program-program yang disusun beserta dengan indikator kinerjanya didasari pada analisis evaluasi diri keadaan Polman Babel yang memuat hasil analisis SWOT sebagai landasan penentuan program dan kegiatan. Renstra ini dipergunakan sebagai acuan bagi penyusunan renstra-renstra pada unit, jurusan dan prodi yang ada di Polman Babel sebagai bentuk renstra yang lebih spesifik pada masing-masing unit. Koherensi renstra pada masing-masing unit pada renstra Polman ini diperlukan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya yang ada untuk mencapai target indikator yang ditetapkan.

1.1 Kondisi Internal

1.1.1 Tata Pamong & Tata Kelola

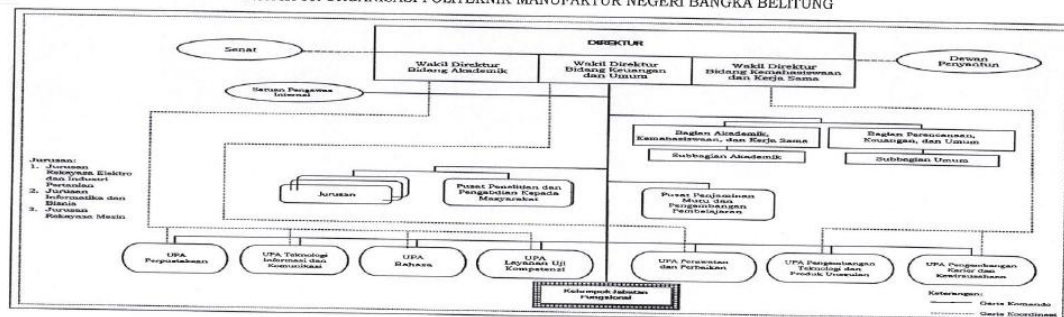
Susunan organisasi dan tata kerja Polman Babel mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

Sedangkan statuta masih berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Perubahan Statuta menyesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja yang terbaru masih dalam tahap finalisasi di tingkat Kementerian sampai saat ini.

Struktur organisasi Polman Babel sebagaimana termaktub dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Polman Babel

Organisasi Polman Babel sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 terdiri antara lain:

- Senat,
- Pemimpin,
- Satuan Pengawas Internal, dan
- Dewan Penyantun.

Pemimpin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 – Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 terdiri antara lain:

- Direktur
- Wakil Direktur bidang Akademik,
- Wakil Direktur bidang Keuangan dan Umum, dan
- Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Organisasi dibawah pemimpin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 terdiri antara lain:

- Pelaksana Akademik,
- Pelaksana Administrasi,
- Penjaminan Mutu, dan

d. Penunjang Akademik.

Pelaksana Akademik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 terdiri antara lain:

- a. Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian;
- b. Jurusan Informatika dan Bisnis;
- c. Jurusan RekaYasa Mesin, dan
- d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pelaksana Administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 terdiri antara lain:

- a. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
- b. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Penjaminan Mutu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

Unit Penunjang Akademik (UPA) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 terdiri antara lain:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bahasa;
- d. Perawatan dan Perbaikan;
- e. Pengembangan Teknologi dan Produk Unggulan;
- f. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan; dan
- g. Layanan Uji Kompetensi.

Beberapa penghargaan yang diperoleh Polman Babel terkait dengan tata pamong dan tata kelola, antara lain:

1. Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2025: Institusi PT Vokasi Skor Publikasi Ilmiah Tertinggi (Silver Winner) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.



2. Sebagai Perguruan Tinggi Vokasi terbaik dalam Publikasi Berdasarkan Jumlah dan Kualitas Publikasi dengan Rasio Dosen Tahun 2023 dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



3. Penghargaan sebagai Satuan Kerja Kinerja Terbaik Peringkat II Tahun 2017 Wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang.



4. Penghargaan Terbaik Ketiga Paritrana Award Tahun 2024 Tingkat Provinsi Bangka Belitung Kategori Pendidikan.



5. Penghargaan Peringkat Dua Satuan Kerja Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan Digipay Satu Periode Semester II Tahun 2023 dari KPPN Pangkalpinang Kementerian Keuangan.



6. Penghargaan Peringkat Dua Satuan Kerja Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan Digipay Satu Tahun 2024 dari KPPN Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



7. Penghargaan Persentase Penyampaian SPT Tahunan Pegawai Tepat Waktu Tertinggi Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bangka.

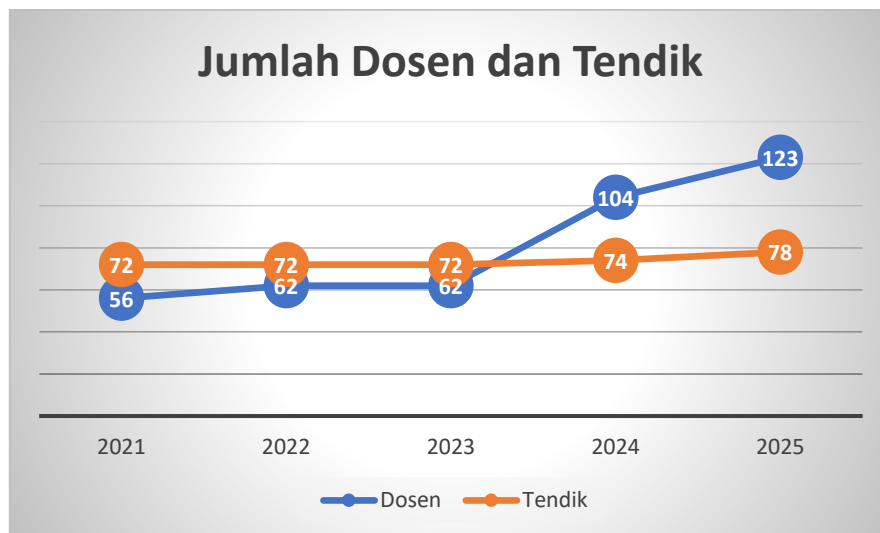


1.1.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Desember 2025, jumlah seluruh Dosen Polman Babel sebanyak 123 orang dengan status sebagai PNS sebanyak 95 orang dan PPPK sebanyak 28 orang. Jumlah ini bertambah secara drastis pada periode pengangkatan Dosen PNS maupun PPPK pada tahun 2022 sampai dengan 2025.

Sedangkan jumlah tenaga kependidikan sampai dengan Desember 2025 adalah sebanyak 78 orang. Jumlah ini tidak banyak mengalami perubahan sejak tahun 2020.

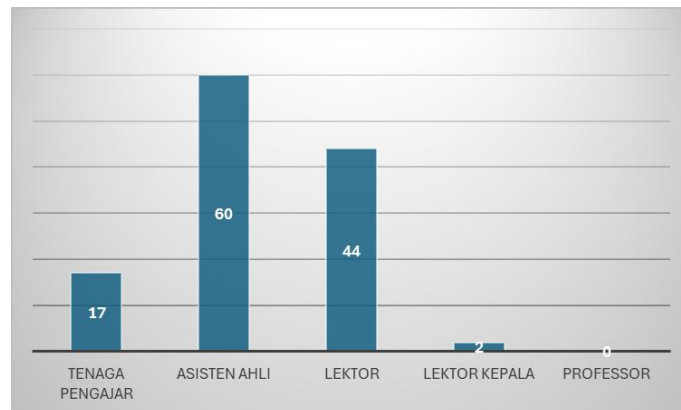
Jumlah perkembangan jumlah Dosen Polman Babel berdasarkan pengangkatan menjadi PNS atau PPPK adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk jabatan akademik Dosen terdiri dari Tenaga Pendidik (belum memiliki Jabatan Akademik / CPNS) sebanyak 17 orang, Asisten Ahli sebanyak 60 orang, Lektor sebanyak 44 orang, Lektor Kepala sebanyak 2 orang dan Profesor

belum ada. Ilustrasi perbandingan jumlah Jabatan Akademik Dosen digambarkan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Perbandingan jumlah Jabatan Akademik Dosen

Sedangkan klasifikasi pendidikan tertinggi Dosen adalah berpendidikan Doktor (S3) sebanyak 8 orang atau 6,5% sedangkan 115 orang atau 93,5% masih berpendidikan Magister (S2).

1.1.3 Program Studi dan Mahasiswa

Jumlah program studi sampai dengan Desember 2025 adalah sebanyak 9 program studi. Jumlah ini bertambah 3 program studi dari tahun 2020 dan bertambah 6 program studi dari tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, program studi tersebut dibawah 3 Jurusan yaitu:

1. Jurusan Rekayasa Mesin;
2. Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian;
3. Jurusan Informatika dan Bisnis.

Sedangkan nama-nama program studi dan pembagian pada jurusannya dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Nama Program Studi dan Jurusan

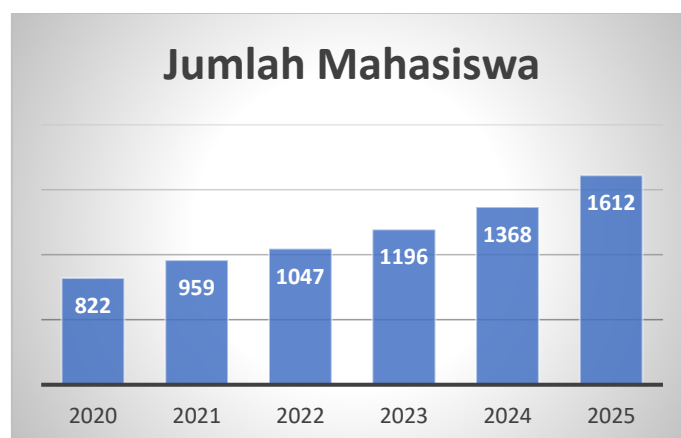
No	Program Studi	Jenjang
Jurusan Rekayasa Mesin		
1	Teknik Perancangan Mekanik	DIII
2	Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin	DIII
3	Teknik Mesin dan Manufaktur	DIV - Sarjana Terapan
4	Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	DIV - Sarjana Terapan

No	Program Studi	Jenjang
	Jurusan Rekayasa Elektro dan Industri Pertanian	
1	Teknik Elektronika	DIII
2	Teknik Elektronika	DIV - Sarjana Terapan
3	Pertanian Presisi	DIV - Sarjana Terapan
	Jurusan Informatika dan Bisnis	
1	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	DIV - Sarjana Terapan
2	Bisnis Digital	DIV - Sarjana Terapan

Dari Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk pengembangan program studi baru dan jurusan baru, yaitu dibidang:

1. Bidang rekayasa Elektro minimal 1 program studi baru;
2. Bidang pertanian minimal 2 program studi baru;
3. Bidang Informatika dan Komputer minimal 2 program studi baru;
4. Bidang Bisnis minimal 2 program studi baru.

Jumlah mahasiswa pada saat penegerian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Perkembangan jumlah mahasiswa antara tahun 2020 sampai 2025 ditampilkan pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Jumlah Mahasiswa dari tahun 2020-2025

Disatu sisi lainnya, jumlah lulusan SMA/SMK/MA sederajat setiap tahunnya di provinsi Bangka Belitung adalah kurang lebih 28.467 siswa berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung.

Sedangkan nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Bangka Belitung dari tahun 2020-2025 dari Badan Pusat Statistik ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 APK Provinsi Bangka Belitung

APK	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bangka Belitung	14,73	15,23	14,85	18,19	20,14	20,89
Nasional	30,85	31,19	31,16	31,45	32	32,89

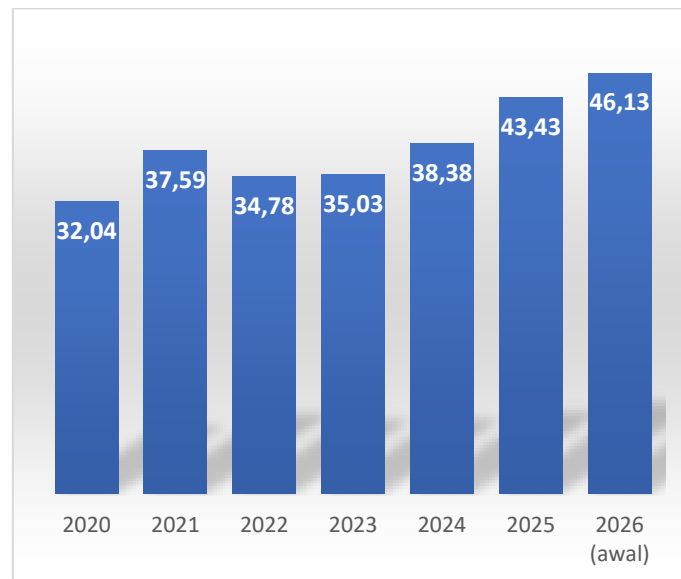
Berdasarkan jumlah daya tampung mahasiswa di Polman Babel, jumlah lulusan SMA sederajat dan juga nilai APK provinsi dapat disimpulkan bahwa Polman Babel perlu untuk meningkatkan daya tampung mahasiswanya.

1.1.4 Keuangan, Sarana, dan Prasarana

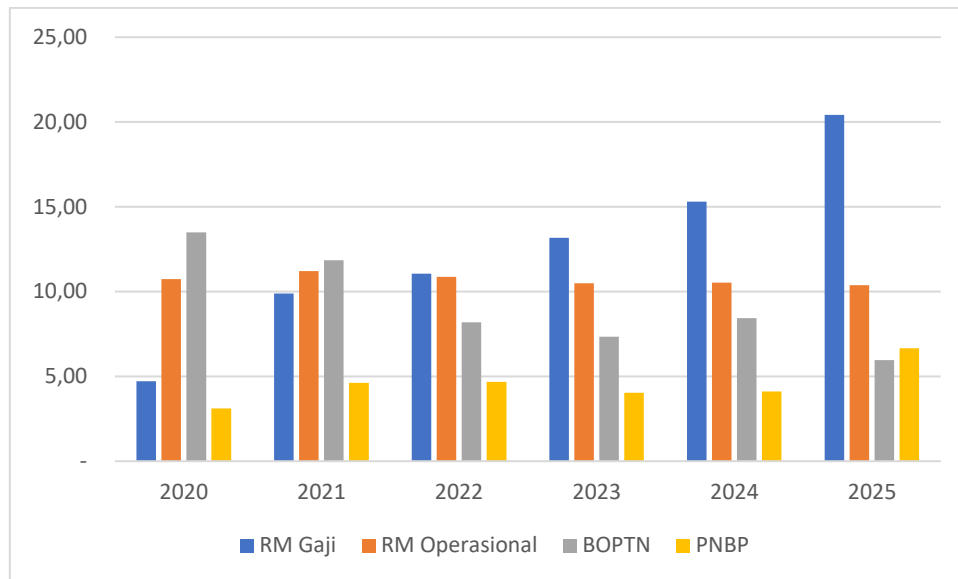
A. Keuangan

Sumber anggaran Polman Babel dari Pemerintah berupa Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Alokasi anggaran Polman Babel mulai tahun 2020-2026 digambarkan pada Gambar 1.5. Sedangkan rincian sumber anggaran ditunjukkan pada Gambar 1.6.



Gambar 1.5 Total Anggaran Polman Babel antara 2020-2026



Gambar 1.6 Anggaran Polman Babel berdasarkan sumbernya

Dari Gambar 1.5 dan 1.6 diatas menunjukkan bahwa secara umum total anggaran meningkat dari tahun 2020-2025. Kenaikan signifikan terlihat terjadi pada sumber anggaran RM Gaji (belanja 51) yang diakibatkan oleh perubahan status pegawai PPNN menjadi ASN dan juga perekrutan pegawai ASN baru. Kenaikan juga terlihat pada sumber PNBPN dimana total PNBPN pada tahun 2025. Sedangkan sumber BOPTN terlihat penurunan yang signifikan lebih dari 50% antara tahun 2020 dengan tahun 2025.

B. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2020, luas lahan yang dimiliki Polman Babel hanya 4,6 Ha yang berlokasi di Air Kantung Sungailiat. Mulai tahun 2024, luas lahan bertambah sekitar 34,5 Ha karena adanya hibah lahan dari:

1. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berupa hibah lahan, bangunan dan peralatan eks Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di desa Penyamun Kecamatan Pemali seluas 4,5 Ha.
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupa lahan di desa Nibung Kecamatan Koba seluas 30 Ha.

Sehingga luas lahan Polman Babel per Desember 2025 adalah 39,1 Ha yang tersebar di 3 lokasi kampus.



Gambar 1.7 Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Lahan dari Bupati Bangka Tengah ke Sekretris Jenderal Kemendikbudristek.

Pada tahun 2023 Polman Babel mendapatkan hibah pembangunan Gedung Kuliah Bersama dengan luas kurang lebih 4 ribu meter persegi dan 4 lantai di Kampus Air Kantung. Gedung ini telah diresmikan pada tahun 2024 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek.



Gambar 1.8 Prasasti Peresmian Gedung Kuliah Bersama



Gambar 1.9 Gedung Kuliah Bersama

1.1.5 Sistem Informasi

Sistem informasi yang tersedia di Polman Babel telah dikembangkan sejak tahun 2017 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan manajemen Polman. Sistem informasi telah didukung dengan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia.

Pada saat ini Polman Babel telah memiliki UPT Sistem Informasi dengan dukungan data center yang menempati ruangan seluas 40m². Perangkat keras

yang tersedia adalah database server, application server, router dan perangkat jaringan. Untuk mendukung beroperasinya data center dengan optimal, telah disediakan sistem backup daya listrik berupa UPS dan genset sehingga data centre selalu hidup 24 jam.

Data center terhubung ke seluruh bagian di dalam Polman Babel melalui jaringan intranet menggunakan jaringan serat optik 1 Gbps yang tersebar ke berbagai titik layanan melalui router. Interkoneksi komputer dan smartphone terhubung melalui jaringan kabel UTP dan Wifi.

No. ↑	Nama Layanan	Link
1	Website Penerimaan Mahasiswa Baru	Link
2	Kumpulan Data Prestasi Mahasiswa dan Pegawai Polman	Link
3	Kumpulan Peraturan, Pedoman, Keputusan (Download Center)	Link
4	Kumpulan Dokumen Kerjasama Polman dengan pihak Eksternal berupa Mou atau PKS	Link
5	Sistem Informasi Tracer Study untuk Pengguna Lulusan / Industri	Link
6	Sistem Informasi Tracer Study untuk Alumni	Link
7	Sistem Informasi Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK)	Link
8	Repository: Kumpulan Koleksi Karya Mahasiswa dan Pegawai (Proyek Akhir, Buku, Modul, dll)	Link
9	Website Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Link

Gambar 1.10 Link fasilitas Sistem Informasi yang tersedia di menu Layanan

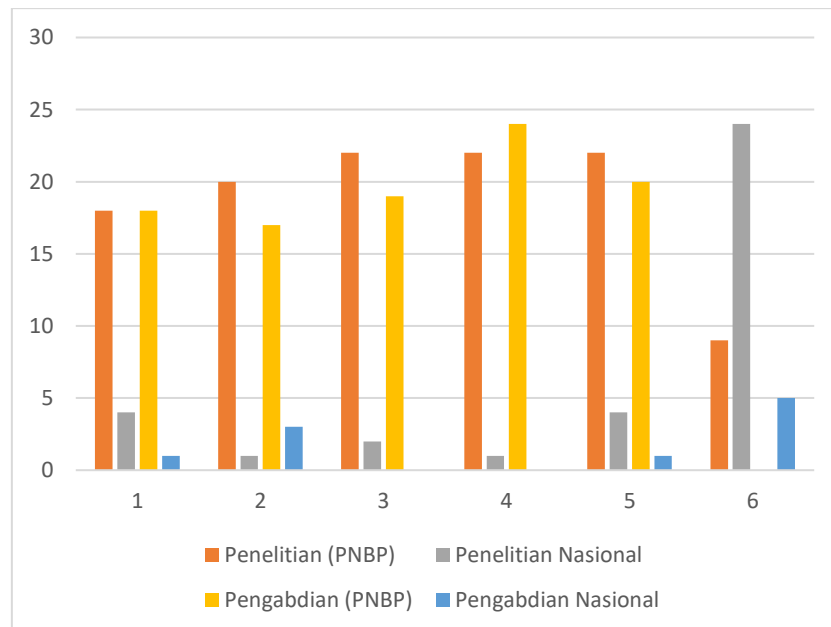
Sistem informasi yang berjalan dan telah digunakan dapat dilihat pada menu Layanan di website Polman Babel <https://polman-babel.ac.id/in/layanan>, antara lain:

1. Website Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Kumpulan Data Prestasi Mahasiswa dan Pegawai Polman
3. Kumpulan Peraturan, Pedoman, Keputusan (Download Center)
4. Kumpulan Dokumen Kerjasama Polman dengan pihak Eksternal berupa Mou atau PKS
5. Sistem Informasi Tracer Study untuk Pengguna Lulusan / Industri
6. Sistem Informasi Tracer Study untuk Alumni
7. Sistem Informasi Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK)
8. Repository: Kumpulan Koleksi Karya Mahasiswa dan Pegawai (Proyek Akhir, Buku, Modul, dll)
9. Website Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
10. Sistem Informasi Penjaminan Mutu
11. Sistem Informasi Jurnal Manutech
12. Sistem Informasi Jurnal Dulang (Pengabdian Kepada Masyarakat)
13. Website Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
14. Sistem Informasi Seminar Nasional Inovasi Teknologi Terapan (SNITT)
15. Sistem Informasi Jurnal Inovasi Teknologi Terapan (JITT)

16. Sistem Informasi Layanan Koleksi Digital Perpustakaan
17. Website Perpustakaan
18. Sistem Informasi Disposisi Surat Internal
19. Sistem Naskah Dinas Elektronik Kementerian (SINDE)
20. Sistem Informasi Absensi Online
21. Sistem Informasi Kepegawaian (Data Pribadi, Pangkat Golongan, Gaji, dll)
22. Sistem Informasi Keuangan
23. Learning Management System (LMS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (e- PPKS)
24. Website Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
25. Website Satuan Pengawas Internal (SPI)
26. Website Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), termasuk Laporan Kinerja (LAKIP), Perjanjian Kinerja (PK)
27. Website Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
28. Sistem Informasi Pelaporan Perawatan dan Perbaikan Peralatan/Perangkat terkait IT (Laptop, WiFi, dll)

1.1.6 Penelitian & Pengabdian

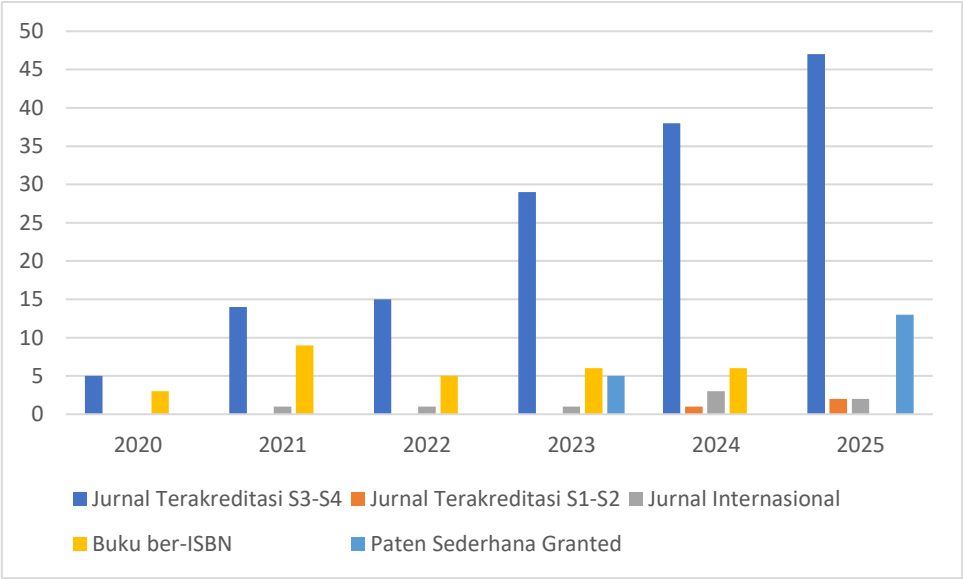
Jumlah judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan pembiayaan dari hibah kompetisi nasional maupun dari pembiayaan institusi melalui PNBP dari tahun 2021 sampai dengan 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.11.



Gambar 1.11 Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan pembiayaan

Dari Gambar 1.11 terlihat bahwa mayoritas judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendapatkan pembiayaan dari internal institusi kecuali pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan perlunya langkah strategis dalam pengembangan kapasitas para dosen di Polman Babel dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hal jumlah publikasi, Polman Babel memberikan bantuan biaya publikasi di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Jumlah judul yang mendapatkan bantuan biaya ditunjukkan pada Gambar 1.12.



Gambar 1.12 Jumlah bantuan biaya publikasi

Gambar 1.12 menunjukkan bahwa publikasi Polman Babel mayoritas masih pada artikel terbit pada Sinta 3 – Sinta 4, dan masih sedikit untuk artikel pada Sinta 1, Sinta 2, atau jurnal internasional.

1.1.7 Sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi

Sampai dengan tahun 2022 status akreditasi program studi ditampilkan pada Tabel 1.3. Dari seluruh 6 Program Studi, 1 Program Studi (Rekayasa Perangkat Lunak) dalam proses pengajuan akreditasi.

Tabel 1.3. Data Akreditasi Program Studi

Program Studi	Jenjang	Tahun SK	Peringkat	Tanggal Daluarsa
Teknik Elektronika	D-III	2018	B	2023-04-24
Teknik Mesin Dan Manufaktur	D-IV	2019	C	2024-08-06

Program Studi	Jenjang	Tahun SK	Peringkat	Tanggal Daluarsa
Teknik Perancangan Mekanik	D-III	2018	B	2023-08-07
Teknik Perawatan Dan Perbaikan Mesin	D-III	2019	B	2024-02-26
Teknik Elektronika	D-IV	2019	C	2024-09-03
Teknik Rekayasa Perangkat lunak	D-IV	2022	BAIK	2027-11-30
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	Institusi	2021	BAIK	2026-05-04

Tetapi per tahun 2025, perbaikan telah dilakukan sehingga status akreditasi program studi ditampilkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Data Akreditasi Program Studi

Program Studi	Jenjang	Tahun SK	Peringkat	Ket
Teknik Elektronika	D-III	2023	UNGGUL	
Teknik Mesin Dan Manufaktur	D-IV	2024	UNGGUL	
Teknik Perancangan Mekanik	D-III	2023	UNGGUL	
Teknik Perawatan Dan Perbaikan Mesin	D-III	2024	UNGGUL	
Teknik Elektronika	D-IV	2024	BAIK SEKALI	
Teknik Rekayasa Perangkat lunak	D-IV	2022	BAIK	
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	Institusi	2021	BAIK	
Bisnis Digital	D-IV	2025	BAIK	Prodi Baru
Pertanian Presisi	D-IV	2025	BAIK	Prodi Baru
Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	D-IV	2025	BAIK	Prodi Baru

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 tersebut diatas menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan status akreditasi, dengan 4 Akreditasi Unggul dan 1 program studi terakreditasi Baik Sekali.

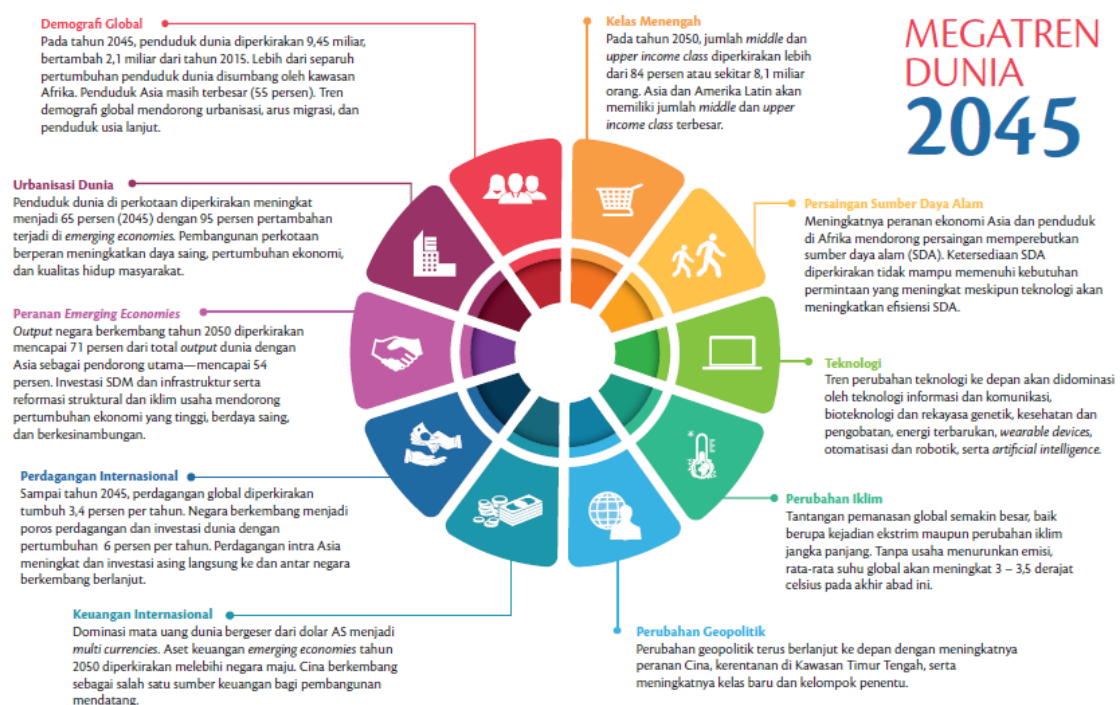
1.2 Kondisi Eksternal

1.2.1. Megatrend Dunia 2045

Sesuai dengan dokumen Indonesia Emas 2045 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Empat Pilar menuju Visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan; serta
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Sedangkan tantangan berupa Megatrend Dunia tahun 2045 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.13 Megatrend Dunia 2045

A. Demografi Global

Penduduk dunia pada tahun 2045 diperkirakan mencapai sekitar 9,45 miliar jiwa, bertambah 2,1 miliar jiwa dari tahun 2015. Pada tahun 2015, penduduk dunia berjumlah 7,35 miliar jiwa, meningkat 1,1 persen per tahun selama 30

tahun terakhir (1985 – 2015), lebih lambat dari 30 tahun sebelumnya (tumbuh 1,9 persen per tahun, 1955 – 1985). Pada tahun 2015, 59,8 persen penduduk dunia tinggal di kawasan Asia, 16,1 persen di kawasan Afrika, 10,1 persen di kawasan Eropa, 8,7 persen di kawasan Amerika Latin dan Karibia, serta sisanya 5,4 persen di kawasan Amerika Utara dan Oceania. Hingga tahun 2045, pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan melambat dengan penambahan sekitar 0,84 persen per tahun.

Pada 2045, jumlah penduduk terbesar masih di Asia, yakni 5,22 miliar jiwa atau 55,2 persen dari total penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk terbesar disumbang oleh Afrika. Lebih dari separuh pertumbuhan penduduk dunia selama 30 tahun ke depan disumbang dari Afrika dengan pertumbuhan 2,2 persen per tahun. Asia menjadi penyumbang kedua terbesar.

Jumlah penduduk India akan melampaui Cina setelah tahun 2022, dan menjadi sekitar 1,7 miliar jiwa tahun 2050. Sementara jumlah penduduk Eropa diperkirakan terus berkurang, dari 738 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 714 juta jiwa pada tahun 2045. Penduduk Jepang diperkirakan berkurang dari 125 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi sekitar 110,5 juta jiwa pada tahun 2045.

Dengan tingginya pertumbuhan penduduk di negara-negara di Afrika yang sebagian merupakan negara kurang berkembang dihadapkan pada tantangan seperti kemiskinan dan kesenjangan kelaparan dan kekurangan nutrisi, pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pelayanan dasar bagi rakyatnya. Ketimpangan antar kawasan dunia tetap merupakan tantangan besar dunia untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

PENDUDUK DUNIA Tahun 2015, 2030, 2045, 2050, 2100					
	Penduduk (Juta)				
	2015	2030	2045	2050	2100
Dunia	7.349	8.501	9.454	9.725	11.213
Afrika	1.186	1.679	2.268	2.478	4.387
Asia	4.393	4.923	5.218	5.267	4.889
Eropa	738	734	714	707	646
Amerika Latin dan Karibia	634	721	774	784	721
Amerika Utara	358	396	425	483	500
Oceania	39	47	54	57	71

Gambar 1.14 Perkiraan Jumlah Penduduk Dunia

(Sumber: UN, World Population Prospect, the 2015 revision)

Migrasi antarnegara tinggi. Dengan tekanan penduduk yang besar di Afrika dan Asia serta perbedaan tingkat ekonomi antarkawasan, potensi migrasi antarnegara diperkirakan tetap tinggi. Kawasan Eropa, Amerika Utara, dan Oceania masih menjadi negara tujuan migran. Sementara Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia menjadi kawasan asal migran. Migrasi antarnegara tersebut

membantu keseimbangan pasar tenaga kerja global, terutama untuk tenaga kerja berketerampilan rendah dan menengah. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan imigrasi negara tujuan migran yang sangat beragam.

Jumlah penduduk usia lanjut meningkat tinggi. Dengan penurunan tingkat fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup, proporsi penduduk usia lanjut dunia meningkat. Pada tahun 2015, jumlah penduduk dunia berusia 60 tahun atau lebih mencapai sekitar 901 juta orang (12 persen) dan terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 3,3 persen per tahun. Meningkatnya aging population akan memberi tekanan fiskal dan politis antara lain bagi perbaikan sistem kesehatan dan perluasan perlindungan sosial.

B. Urbanisasi Dunia

Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi. Pada tahun 1980-an, sebagian besar masyarakat dunia masih tinggal di perdesaan. Saat ini, lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di perkotaan dengan migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan terbesar terjadi di kawasan Asia. Pada tahun 1970-an, hanya sekitar 20 persen atau 442 juta penduduk Asia tinggal di perkotaan. PBB memperkirakan penduduk perkotaan di Asia pada tahun 2050 akan meningkat menjadi 3,3 miliar dengan penduduk Cina yang tinggal di perkotaan mencapai sekitar 1 miliar orang.

Pada tahun 2050, sekitar 65 persen penduduk dunia akan tinggal di perkotaan, dengan 95 persen pertambahannya di emerging economies. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25 – 30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

Peranan perkotaan dalam pembangunan semakin penting sebagai ruang bagi berkembangnya eksternalitas positif. Konsentrasi industri dan tenaga kerja di kawasan perkotaan mempercepat proses produksi yang semakin efisien dan produktivitas yang tinggi yang terwujud dari pemanfaatan bersama sumber daya pembangunan dan teknologi (sharing mechanism), mobilisasi tenaga pekerja dan peralatan yang efisien (matching mechanism), serta adaptasi teknologi dan proses produksi yang lebih baik (learning mechanism). Jenis industri komponen dan intermediate product semakin berkembang di masa mendatang, seiring dengan kompleksitas produk bermuatan teknologi tinggi serta efisiensi transportasi. Proses spesialisasi industri menuju pada peningkatan interdependensi antar industri, penurunan biaya transaksi, dan peningkatan proses alih teknologi antara pelaku ekonomi.

Terdapat dua tipe aglomerasi perkotaan secara global, yaitu aglomerasi dalam bentuk konsentrasi industri yang sejenis (localization economies) dan konsentrasi beragam jenis industri yang saling berkaitan (urbanization economies). Tren aglomerasi perkotaan ke depan akan lebih mengarah pada

urbanization economies dengan ciri sektor industri perakitan, jasa, dan perdagangan yang lebih dominan. Tren ini menjadi penentu perubahan struktur kota yang lebih kompak (dense) dan mendorong perkembangan kota metropolitan dan megapolitan, sedangkan industri komponen dan industri dasar terkonsentrasi di kota berskala sedang atau kecil.

Tren perkembangan kota menyebabkan semakin besarnya kesenjangan antara kota metropolitan dan kota sedang atau kecil serta kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan antar hirarki perkotaan tersebut menjadi tantangan pembangunan di masa depan, terutama dalam penyebaran demografi antar wilayah serta konsentrasi infrastruktur dan prasarana utama yang berkualitas seperti rumah sakit atau perguruan tinggi. Antisipasi terhadap konsentrasi penduduk di metropolitan dilakukan dengan pembangunan kota sedang dan kecil yang lebih layak dihuni dengan kualitas layanan setara dengan kota besar. Konsep tersebut diwujudkan melalui pengembangan green cities, smart cities, atau ubiquitous cities yang saat ini menjadi tren pembangunan perkotaan global.

C. Meningkatnya Peranan Emerging Economies

Terjadi pergeseran geoekonomi dunia. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen dari total nilai output global.

Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meski demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi □ 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang.

Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian global pada tahun 2015 berjumlah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Cina sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, World Economic Outlook, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Cina, India, AS, Jepang & Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

D. Perdagangan Internasional

Perbaikan iklim perdagangan global pasca krisis. Kondisi perdagangan dunia pasca krisis global tahun 2009 melambat, seiring dengan turunnya harga komoditas dan meningkatnya proteksionisme. Pada tahun 2016, pertumbuhan perdagangan (barang dan jasa riil) hanya mencapai 1,9 persen, terendah dalam lima tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2045, laju pertumbuhan perdagangan global (barang dan jasa riil) diperkirakan stabil sekitar 3,4 persen per tahun.

Negara berkembang sebagai poros perdagangan dan investasi dunia. Pertumbuhan perdagangan global akan ditopang oleh pertumbuhan perdagangan negara berkembang. Laju pertumbuhan perdagangan antar negara berkembang diperkirakan mencapai 6 persen—hampir dua kali lipat dari pertumbuhan perdagangan global. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang utamanya akan didorong oleh negara di kawasan Asia Timur yang memiliki tingkat integrasi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Cina, India, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia diperkirakan akan memiliki laju pertumbuhan perdagangan internasional sampai tahun 2030 sebesar 8-11 persen setiap tahunnya.

Cina diperkirakan tetap sebagai eksportir global terbesar. Peranan Cina dalam ekspor global diperkirakan mencapai 19 persen pada tahun 2030, meningkat dari 12 persen pada tahun 2012. Untuk India dan Indonesia, diperkirakan pada tahun 2030 akan memberikan kontribusi sebesar 3 persen dan 2 persen dari arus ekspor global. Peranan negara maju dalam perdagangan global seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang akan semakin menurun—menuju hanya 12 persen, 14 persen, dan 4 persen pada tahun 2030 dari sebelumnya yang mencapai 14 persen, 19 persen, dan 7 persen pada tahun 2012.

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang ditopang oleh perdagangan intra-Asia. Saat ini sebanyak 50 persen perdagangan di kawasan Asia Timur merupakan perdagangan intra-Asia dengan tren yang berlanjut. Cina, India dan negara-negara ASEAN akan menjadi motor penggerak perdagangan antar negara berkembang dan menjadi poros perdagangan dunia. Pertumbuhan perdagangan tidak hanya akan terjadi pada sektor barang saja tetapi juga pada sektor jasa. Ekspor jasa dari negara berkembang diperkirakan tumbuh mencapai 9,1 persen per tahun sampai dengan tahun 2035—melampaui pertumbuhan ekspor jasa negara maju dan dunia sebesar 4,9 persen dan 6,7 persen. Indonesia perlu mengambil peran yang lebih penting dan lebih besar dalam perdagangan intra-Asia dan global mendatang.

Aliran dana investasi asing langsung (FDI) ke dan antar negara berkembang diperkirakan terus berlanjut. Sejak tahun 2012, nilai investasi asing langsung yang masuk ke negara berkembang melebihi ke negara maju dan diperkirakan berlanjut di masa mendatang. Pada tahun 2014, FDI yang masuk ke negara berkembang mencapai 55 persen dari total nilai investasi global. Cina merupakan negara penerima investasi asing langsung terbesar dengan nilai mencapai USD 129 miliar, diikuti dengan Hongkong sebesar USD 103 miliar dan Amerika Serikat senilai USD 92 miliar. Indonesia menerima sekitar USD 23 miliar investasi asing langsung pada tahun 2014. Seiring dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, nilai investasi asing langsung yang diterima oleh negara berkembang diperkirakan terus meningkat. Nilai investasi asing langsung yang diberikan oleh Cina diperkirakan semakin meningkat di masa mendatang, seiring dengan perluasan kegiatan ekonomi Cina di banyak negara berkembang lainnya.

Integrasi dengan Global Value Chain menjadi kunci pertumbuhan negara berkembang. Perdagangan internasional negara berkembang, selain didorong oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga terjadi akibat peningkatan integrasi dengan Global Value Chain (GVC). Lebih dari 50 persen nilai tambah produk ekspor negara berkembang terhubung dengan GVC dan akselerasi aktivitas GVC antar negara berkembang diperkirakan terus terjadi.

Kawasan Asia Timur dan ASEAN sebagai pusat GVC dunia. Dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, GVC internasional akan semakin terpusat di kawasan Asia Timur dan ASEAN—khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor. Dengan GVC yang semakin berkembang, sebuah negara tidak lagi melakukan spesialisasi di sektor atau jenis industri,

tetapi mengarah kepada spesialisasi pada skills set yang spesifik di dalam sebuah proses produksi dan keunggulan dalam perakitan (assembly) distribusi produk ke konsumen secara global. Diperkirakan Cina akan membentuk industri terintegrasi melalui peningkatan penggunaan barang komponen dalam negeri—secara tidak langsung mempengaruhi keseimbangan dengan mitra dagang yang selama ini mengekspor ke Cina.

Perlindungan konsumen dan sinergi tata kelola sebagai paradigma baru kebijakan proteksi perdagangan. Pola kebijakan perdagangan yang selama ini lebih menekankan kepada perlindungan produsen domestik melalui pengenaan bea masuk barang impor akan bergeser pada perlindungan konsumen melalui penerapan standar kualitas barang dan mekanisme non-tarif lainnya. Sinergi tata kelola kebijakan perdagangan lintas sektor menjadi standar baru dalam perjanjian perdagangan multilateral. Trans Pacific Partnership (TPP) dan Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) merupakan dua perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan banyak negara dan mencakup klausul mengenai komitmen kebijakan di luar kebijakan perdagangan (tenaga kerja, rantai produksi, korupsi dan lingkungan). Mega-trade agreement seperti TPP dan TTIP akan menjadi benchmark dalam perjanjian perdagangan internasional mendatang. Standar perlindungan konsumen juga dikembangkan secara sinergis dengan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan.

E. Keuangan Internasional

Sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1980, aset sektor keuangan dunia (terdiri dari aset perbankan, pasar obligasi, dan kapitalisasi pasar saham) sebesar 100 persen PDB. Sejak era liberalisasi pasar keuangan dan meningkatnya tabungan nasional, aset sektor keuangan meningkat dan mencapai 380 persen PDB dunia (2013). Negara maju yang dikenal dengan G4 (Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Jepang) memiliki proporsi aset sektor keuangan sebesar 517 persen PDB, sedangkan negara-negara berkembang memiliki aset sektor keuangan yang relatif kecil yakni 193 persen PDB.

Di antara negara G4 terdapat perbedaan komposisi aset sektor keuangan. Negara Anglo-Sakson, yakni Amerika Serikat dan Inggris, memiliki kapitalisasi pasar saham yang tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya aktivitas dan kapitalisasi di bursa New York dan London. Sedangkan dua negara lainnya, yakni Jepang dan Uni Eropa, memiliki nilai aset perbankan dan pasar obligasi yang lebih tinggi. Ini sejalan dengan tingkat tabungan nasional yang tinggi di Jepang dan sebagian negara Uni Eropa.

Negara maju mendominasi ukuran pasar keuangan dalam hal rerata transaksi mata uang dunia. Perubahan geoekonomi ke Asia dan digitalisasi sektor keuangan ke depan akan merubah dominasi mata uang dunia oleh beberapa negara maju.

Negara maju tidak hanya dominan dalam hal aset sektor keuangan, tetapi juga dalam jumlah dana kelolaan (Asset Under Management/AUM). Nilai AUM mencapai sebesar USD 48,1 triliun (2004) dan terus meningkat mencapai USD 108,5 triliun (2014). Sekitar sepertiga dari angka itu dikelola oleh fund manager. Pasar sektor keuangan yang sangat dalam di negara maju, membuat banyak aset manager terbaik dunia berasal dari negara maju. Bisnis AUM di seluruh dunia juga dikuasai oleh negara maju. Khusus di negara berkembang, Asia mendominasi ukuran pasar keuangan. Asia yang berukuran 47 persen PDB dari total negara berkembang, aset sektor keuangannya mencapai 64 persen dari total negara berkembang.

Negara-negara berkembang meningkatkan porsi kepemilikan cadangan devisa secara signifikan. Porsi cadangan devisa meningkat dari 40 persen dari cadangan devisa global (2003) menjadi 66 persen (2013). Walaupun kenaikan ini tidak terlepas dari kebijakan perdagangan Cina, pada negara berkembang lain banyak dijumpai kenaikan yang tinggi dalam hal investasi asing langsung (foreign direct investment, FDI) dan investasi portofolio (foreign portfolio investment, FPI).

Kemajuan sektor keuangan berkorelasi dengan kemajuan ekonomi. Kemajuan sektor keuangan dapat dinilai dari Financial Development Index. Indeks ini memiliki korelasi positif dengan laju pertumbuhan ekonominya sampai titik tertentu lalu menurun hingga membentuk kurva-U terbalik. Negara dunia ketiga, misalnya Gambia, memiliki Financial Development Index yang rendah (0,2) dan pertumbuhan ekonomi yang rendah (1 persen). Maroko yang memiliki indeks sektor keuangan yang sedang (0,4) memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (5 persen). Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, memiliki Financial Development Index tinggi (0,8-0,9) tetapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah (3 persen).

Sektor keuangan merupakan sektor sangat dinamis dan terkait dengan sektor riil. Struktur ekonomi global, sistem moneter dan sistem keuangan global berubah drastis dalam 50 tahun terakhir. Kebijakan perdagangan, teknologi, rantai pasok dan produksi, serta globalisasi sektor keuangan telah menghilangkan batasan antar negara. Interaksi dinamis antara sektor keuangan dan sektor riil menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan. Seringkali otoritas sektor ekonomi dan sektor keuangan tidak mampu menjalankan fungsinya. Beberapa contoh kegagalan pasar yang tidak bisa dicegah oleh otoritas, antara lain: krisis Meksiko (1994-1995), krisis Thailand (1997), krisis Indonesia (1997), krisis Argentina (2001 dan 2003), krisis keuangan global (2007-2008), serta krisis Yunani dan Irlandia.

F. Kelas Pendapatan Menengah (Middle Income Class)

Abad ke-21 ditandai dengan kemunculan kelas pendapatan menengah (Middle Income Class) yang meningkat □ bahkan pada beberapa negara berjumlah besar □ di negara berkembang yang biasa disebut Emerging Market Economies

(EMEs) khususnya di Kawasan Asia dan Amerika Latin. Tren pertumbuhan pesat kelas menengah di EMEs diperkirakan terus berlanjut.

Mengacu pada definisi OECD1, pada tahun 2050, proporsi middle dan upper class diperkirakan mencapai lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang. Sampai tahun 2050 akan ada tambahan lebih dari 4 miliar orang yang tergolong middle dan upper income. Dari segi persebarannya, dalam jumlah absolut, Asia dan Amerika Latin akan memiliki jumlah middle dan upper income terbesar di emerging economies. Dalam kurun 15 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Amerika Latin meningkat tajam seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan penurunan kesenjangan karena keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Cina, Brasil, dan Meksiko dan di Asia seperti India, Indonesia, dan Vietnam.

Berdasarkan tren saat ini, pada tahun 2050, lebih dari 90 persen penduduk Amerika Latin dan hampir semua orang Asia Timur dapat digolongkan baik middle maupun upper income. Pada tahun 2050, hampir tidak ditemukan lagi kemiskinan absolut dengan standar kemiskinan saat ini di dua kawasan tersebut. Jumlah total middle dan upper income dapat mencapai 2,3 miliar di Asia Timur dan 700 miliar di Amerika Latin. Begitu juga di Timur Tengah, Asia Tengah, dan India akan didominasi oleh middle dan upper income. Middle class juga mulai tumbuh di Kawasan Afrika. Ini merupakan perubahan besar dibanding satu generasi yang lalu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mayoritas penduduk dunia adalah middle class.

Pertumbuhan middle income class yang pesat menciptakan peluang dan memberikan tantangan karena jumlahnya yang semakin besar dan memberi pengaruh luas secara ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi, middle class akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pendapatan per kapita akan mendorong pengeluaran serta meningkatkan tabungan dan investasi. Ini merupakan peluang bagi baik industri dalam negeri maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meningkatnya middle class juga memberi peluang bagi berkembangnya industri baru, antara lain industri di bidang instrumen keuangan dan investasi. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh industri dalam negeri.

Dari aspek sosial dan politik, meningkatnya kelas menengah juga mendorong kemampuan akses terhadap informasi dan exposure masyarakat terhadap berbagai macam informasi dan ideologi. Selain itu, exposure terhadap informasi dan ideologi tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran nilai-nilai (values) di tengah masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya konflik antar generasi apabila tidak diantisipasi dengan baik. Akses kepada informasi tersebut juga menciptakan generasi yang lebih terbuka sehingga nilai budaya suatu negara akan diwarnai oleh budaya global seperti demokrasi, persamaan hak, dan kreativitas berinovasi secara sosial.

G. Persaingan Sumber Daya Alam

Persaingan memperebutkan sumber daya alam tetap tinggi. Bertambahnya penduduk dunia, meningkatnya kegiatan ekonomi, serta perubahan gaya hidup meningkatkan kebutuhan akan sumber daya alam yang terbatas dan pada gilirannya mendorong persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam, baik antarwilayah di dalam negeri maupun antar negara. Peningkatan sumber daya alam diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat pesat meskipun pertambahan penduduk dunia melambat kecuali terjadi terobosan teknologi (technology breakthrough) yang berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya alam di tengah jumlah penduduk yang meningkat sudah lama menjadi kekhawatiran dunia. Kekhawatiran ini semakin meningkat sejak tahun 2004 sejalan dengan semakin derasnya globalisasi dan meningkatnya permintaan sumber daya alam dari Cina dan India yang pada gilirannya mendorong terjadinya super cycle commodity, kenaikan harga riil komoditi yang sangat tinggi sepanjang sejarah. Meskipun dekade commodity boom berakhir pada tahun 2013, kekhawatiran terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam tetap besar.

Ke depan dengan siklus perekonomian global, fluktuasi harga komoditi diperkirakan terus berlanjut. Dengan permintaan terhadap komoditi yang tetap tinggi, meski teknologi diperkirakan terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dari sumber daya alam, persaingan sumber daya alam diperkirakan makin meningkat.

H. Teknologi

Tren global hingga tahun 2045 akan didominasi oleh perubahan teknologi di beberapa bidang, antara lain teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, wearable devices, otomatisasi dan robotik, serta artificial intelligence. Perkembangan teknologi akan mempercepat proses globalisasi dan pertukaran informasi antar negara. Teknologi juga meningkatkan mobilitas, produktivitas, serta usia harapan hidup seiring dengan perkembangan teknologi bidang kesehatan dan rekayasa genetik.

Perkembangan teknologi digital dan informasi akan semakin cepat seiring dengan perkembangan sektor jasa dan transaksi online. Teknologi digital juga menjadi faktor utama terjadinya revolusi di sektor keuangan dan transaksi perdagangan secara global. Transaksi melalui uang digital (digital currency) akan mengubah proses transaksi secara global dan mendorong definancialization, terutama untuk mata uang negara kecil.

Perkembangan nano-teknologi akan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan dasar dan intermediate product. Limbah dari proses produksi juga akan semakin rendah. Perkembangan industri berbasis bahan kimia dan radioaktif

menjadi tantangan baru dalam penanganan limbah dari proses industri berbasis teknologi.

Perubahan teknologi yang berlangsung cepat berdampak langsung pada industri manufaktur. Revolusi industri abad 18 (industri 1.0) mengawali proses mekanisasi industri yang mendorong transformasi ekonomi dunia secara cepat dan belum pernah diperkirakan sebelumnya. Revolusi tersebut terus berlanjut pada abad 19 (industri 2.0) seiring dengan penggunaan listrik dan division of labor yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan sistem mass production. Pertengahan abad 20 mengawali tahap revolusi industri (industri 3.0) melalui pengembangan mesin elektronik dan otomasi di bidang produksi. Proses tersebut terus terjadi, hingga abad 21 ditandai dengan industri berbasis cyber yang dikelola secara virtual dan otomatisasi proses produksi (industri 4.0).

Tren industrialisasi menjadi penentu postur ekonomi dunia tahun 2045. Negara maju yang saat ini telah memasuki era revolusi industri 3.0 dan 4.0 akan fokus pada industri yang didominasi oleh otomatisasi dan perangkat produksi yang dikendalikan melalui sistem berbasis internet. Perkembangan ini sejalan dengan penurunan ketersediaan pekerja pada negara maju yang telah memasuki era aging population. Jenis produk yang dihasilkan oleh negara tersebut adalah high value dan customized product. Negara berkembang akan beralih dari era industri 2.0 menuju industri 3.0, dimana kebutuhan terhadap pekerja terampil (skilled workers) semakin tinggi. Emerging economies akan berada pada era industri 3.0, dimana industri dengan pola mass production akan berjalan seiring dengan customized product yang diproduksi secara efisien dengan dukungan perangkat elektronik dan robotik.

I. Perubahan Iklim

Dunia saat ini menghadapi tantangan serius yaitu pemanasan global yang intensitasnya semakin tinggi, baik berupa kejadian cuaca dan iklim ekstrim maupun perubahan iklim dalam jangka panjang. Perubahan iklim membawa dampak yang luas pada banyak segi kehidupan manusia.

Perubahan iklim global terutama disebabkan oleh kenaikan suhu global secara signifikan. Kenaikan greenhouse gases (partikel gas yang menyebabkan efek rumah kaca) akan menyebabkan kenaikan suhu global antara 2 – 5 derajat celcius. Kenaikan suhu global ini diperkirakan mencapai puncak pada periode tahun 2030 – 2060. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa probabilitas terjadinya kenaikan suhu global di atas 5 derajat celcius dapat mencapai 20 persen. Kenaikan suhu global diatas 5 derajat memberi dampak yang fatal bagi kehidupan di bumi.

Tanpa usaha dan kerja keras dalam menurunkan emisi, sampai akhir abad ini, rata-rata suhu global akan meningkat sekitar 3 – 3,5 derajat celcius. Dalam laporan “The Emissions Gap Report 2016” yang disusun oleh UNEP, total emisi global gas rumah kaca diperkirakan terus bertambah. Emisi carbon dioxide (GtCO₂e) akan naik sampai kira-kira mencapai 52,7 gigatonnes pada tahun

2014. Dari tahun 2000 sampai dengan 2013 rata-rata peningkatan emisi global gas rumah kaca cukup bervariasi.

Proses pemanasan global berlangsung secara evolutif dengan dampak yang sudah dirasakan dari sekarang. Proses pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca dan iklim yang ekstrim. Kondisi ini meningkatkan ancaman kekeringan di beberapa kawasan, dan sebaliknya, serta resiko banjir dan tanah longsor akan meningkat di kawasan lainnya. Perubahan kondisi atmosfer dan cuaca yang ekstrim juga akan meningkatkan potensi ancaman badai (storm) dan angin kencang (hurricanes dan typhoon).

Di samping itu, penyakit endemik di wilayah tropis akan semakin sulit untuk dihapuskan, misalnya malaria dan demam berdarah. Potensi kemunculan kembali penyakit lama dan potensi jenis penyakit baru juga akan semakin tinggi pada seluruh kawasan, terutama di wilayah tropis. Fenomena pencairan es di kutub juga menaikkan tinggi muka air laut dan menjadi ancaman bagi penduduk di kota-kota pesisir dan meningkatkan ancaman abrasi pantai. Meski dampak perubahan iklim terhadap penurunan produksi bahan pangan belum dirasakan signifikan pada saat ini, potensi masalah tersebut perlu diantisipasi sejak dini.

1.2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) - Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Gambar 1.15 Tujuh Belas Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan, serta disparitas capaian target antarprovinsi yang masih lebar.

A. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan (No Poverty)

Kebijakan yang sesuai untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. Kebijakan ekonomi makro juga menjadi prasyarat untuk pengurangan kemiskinan yaitu stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

B. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan (No Hunger)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat; (2) Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan; (3) Memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet; (4) Memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil; (5) Percepatan pengurangan stunting dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan dan penajaman intervensi spesifik; (6) Intervensi fortifikasi untuk garam dengan yodium, tepung dengan zat besi dan minyak goreng kelapa sawit dengan Vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin .

C. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-Being)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care).

D. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas (Quality Education)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (2) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (4) Memperkuat penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; (5) Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan (6) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

E. Tujuan 5: Kesetaraan Gender (Gender Equality)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya; (2) Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan (3) Meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

F. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman; (2) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; dan (3) Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

G. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan; (2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik; (3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik; (4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan; dan (5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.

H. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)

Kebijakan yang sesuai adalah dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah: (1) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; dan (2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

I. Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Memperkuat infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat; (2) Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; (3) Memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi; (4) Menuntaskan dan memanfaatkan infrastruktur TIK; (5) Melaksanakan pembangunan rendah karbon; dan (6) Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi.

J. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Mengentaskan kemiskinan; (2) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (3) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan (4) Melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

K. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) terkait kolaborasi dengan pemerintah

daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah; dan (3) Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

L. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (Responsible Consumption and Production)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan; (2) Penanganan Limbah; (3) Pengembangan industri hijau; dan (4) Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik.

M. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (2) Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Adapun untuk Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, serta rendah karbon pesisir dan laut.

N. Tujuan 14: Ekosistem Lautan (Life Below Water)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan; (2) Peningkatan tata kelola perikanan, dan (3) Revitalisasi praktek perikanan berkelanjutan.

O. Tujuan 15: Ekosistem Daratan (Life on Land)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) Mengurangi laju deforestasi di Indonesia; dan (3) Mengurangi laju degradasi hutan.

P. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institution)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Konsolidasi demokrasi; (2) Reformasi birokrasi dan tata kelola; (3) Penegakan hukum nasional; dan (4) Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Q. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnership for the Goals)

Kebijakan yang sesuai adalah: (1) Optimalisasi penerimaan negara; (2) Peningkatan nilai tambah ekonomi yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan remitansi pekerja migran; (3) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi; (4) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); (5) Penuntasan

infrastruktur TIK; (6) Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi; dan (7). Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.

1.3 Analisis SWOT & Permasalahan

1.3.1. Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan data-data yang telah disusun maka dapat diringkas beberapa aspek yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

Kekuatan (Strength)

- S.01. Prasarana kampus tersedia memadai
- S.02. Rasio dosen terhadap mahasiswa 1:14
- S.03. Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa
- S.04. Pelaporan keuangan berjalan tertib
- S.05. Pelaporan data pendidikan (Forlap) dilakukan tertib
- S.06. Organ-organ institusi telah terbentuk
- S.07. Sarana belajar mengajar tersedia lengkap dan memadai
- S.08. Jumlah tenaga PLP dan teknisi memadai
- S.09. Masa studi tepat waktu
- S.10. Angka efisiensi edukasi > 95%
- S.11. Kerjasama dengan pengguna sudah berjalan
- S.12. Seluruh lulusan memiliki sertifikasi
- S.13. Tersedia prasarana IT yang baik

Kelemahan (Weakness)

- W.01. Intitusi masuk pada klaster 4
- W.02. Pemanfaatan sumber daya kurang efisien sehingga banyak kapasitas tidak terpakai
- W.03. Dosen dengan kualifikasi S3 masih rendah (2.5%)
- W.04. Sedikit sekali dosen dengan kualifikasi lektor kepala atau guru besar
- W.05. Kurikulum belum menggunakan OBE
- W.06. Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan kurang dari 25%

- W.07. Dosen belum memiliki roadmap penelitian untuk pengembangan teknologi (keunggulan Polman) dan pengembangan keahlian/kompetensi dosen
- W.08. Jumlah kegiatan dan jumlah anggaran penelitian rendah
- W.09. Pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian Dikti, swasta atau pemerintah daerah masih rendah
- W.10. Belum semua dosen melaksanakan kegiatan penelitian & pengabdian
- W.11. Jumlah publikasi internasional terindeks masih rendah
- W.12. Jumlah publikasi nasional pada jurnal yang terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 masih sedikit
- W.13. Hasil pendanaan dari inovasi yang dihasilkan sangat sedikit

Kesempatan (Opportunity)

- O.01. Kebijakan pemerintah untuk peningkatan APK politeknik
- O.02. Angka partisipasi pendidikan tinggi di provinsi Babel yang masih rendah
- O.03. Kebutuhan UMKM dan masyarakat di provinsi Babel untuk peningkatan produktivitas usaha
- O.04. Perkembangan industri di Indonesia
- O.05. Peningkatan mobilitas akademik dunia sehingga meningkatkan kerjasama akademik
- O.06. Peningkatan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat dari Pemerintah
- O.07. Kebijakan insentif perpajakan dari pemerintah pada swasta yang mengalokasikan dana untuk penelitian
- O.08. Penghargaan pemerintah yang semakin besar pada karya-karya inovasi

Ancaman (Threat)

- T.01. Keterbukaan mobilitas tenaga kerja asing masuk ke Indonesia
- T.02. Perkembangan teknologi yang memungkinkan individu untuk belajar mandiri
- T.03. Kebijakan pengakuan kualifikasi pendidikan diluar jalur pendidikan formal

- T.04. Pergeseran kebijakan pemerintah pada fungsi dan peran dosen dan perguruan tinggi
- T.05. Persyaratan pengusul penelitian dan persyaratan kepangkatan yang semakin tinggi

Jika dilihat dari peta analisis SWOT, maka pemetaan yang ada menunjukkan bahwa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung pada suatu keadaan dimana Kelemahan masih lebih banyak dibandingkan dengan kekuatan, dan Kesempatan lebih banyak dibandingkan dengan ancaman. Kondisi ini bukan hanya dilihat dari jumlah indikator, tetapi juga bobot dari masing-masing indikator. Misalkan indikator-indikator output dan outcome atas kinerja Polman Babel masih didominasi dengan kelemahan, sedangkan aspek kekuatan yang ada lebih bertumpu aspek sumber daya peralatan dan pelaksanaan pembelajaran. Dimana dalam aspek pembelajaran yang bersifat kuantitatif (IPK, masa studi).

1.3.2. Analisis Akar Masalah Utama

Berdasarkan data-data yang ada, maka akar permasalahan utama yang perlu diselesaikan agar, dapat tercapai yang utama meliputi:

- a) Tata kelola. Tata kelola yang dijalankan masih bersifat pada pemenuhan kewajiban dan masih belum menunjukkan adanya inovasi-inovasi dalam pengembangan. Proses-proses yang berjalan dilakukan *as is* sehingga belum muncul suatu upaya untuk memperbaiki dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Penyebab dari hal ini dapat dipilahkan pada tiga aspek, yaitu: (a) kompetensi dan semangat kerja dari dosen dan tendik yang masih kurang, misalnya ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi dan peralatan, ketidakmampuan memahami tanggung jawab, serta suasana akademik yang kurang kondusif untuk bisa menyebabkan masing-masing saling mengisi untuk memajukan Polman, (b) kesadaran pada pelaksanaan siklus PPEPP yang masih kurang; (e) pengaturan-pengaturan penjadwalan yang belum efisien dan adaptif.
- b) Kualifikasi sumber daya manusia yang masih kurang. Sedikitnya jumlah doktor dan dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala merupakan salah satu akar permasalahan dari berbagai kinerja yang kurang baik. Selain memberikan dampak langsung pada aspek mutu (dilihat dari aspek input), maka kualifikasi yang kurang ini berkibat pada rendahnya kegiatan penelitian, mutu kegiatan penelitian, dan potensi-potensi kerjasama yang menjadi rendah. Jabatan fungsional yang rendah (Asisten Ahli atau Lektor) secara umum juga berarti kepemilikan rekam jejak penelitian, karya ilmiah dan inovasi yang rendah hal ini membatasi ruang gerak dosen untuk mendapatkan pendanaan-pendanaan penelitian dari eksternal (pemerintah), pada sisi lain juga

memberikan hambatan pada pengembangan jenjang pendidikan yang dapat diselenggarakan. Dampak lain adalah kepercayaan pihak ketiga (swasta, pelaku industri dan pemerintah) yang akan berbeda antara dosen dengan kualifikasi akademik Doktor dan bukan doktor serta yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar dan Asisten Ahli atau Lektor. Kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun dengan institusi dari luar negeri tidak bisa berjalan dalam kesetaraan, sehingga mengecilkan potensi yang dapat diperoleh. Penyebab dari rendahnya kualifikasi SDM ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) Semangat & keberanian studi lanjut S3 yang rendah; (b) Perspektif negatif yang keliru dalam memandang jenjang LK/GB & Doktor yang memberatkan & tidak menguntungkan ;(c) Produktivitas penelitian, inovasi & pengabdian yang kurang.

- c) Inovasi pembelajaran dan pemanfaatan sumber daya yang rendah. Pelaksanaan pembelajaran dan pemanfaatan sumberdaya di Polman Babel masih menggunakan cara-cara yang berjalan dengan kurang melakukan proses pengembangan dengan secara terbuka melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus. Dosen seakan-akan berada pada zona nyaman dalam pembelajaran sehingga tidak melihat secara esensi dan kritis atas hal-hal yang sudah berjalan dan dilakukan. Sehingga dari aspek PPEPP ada yang hilang dalam proses peningkatan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Pola yang berjalan bersifat stagnan dan menutup kemungkinan pengembangan-pengembangan baru karena keengganan mengambil resiko dan melakukan suatu upaya evaluasi diri dan perbaikan. Hal-hal yang telah berjalan kurang difahami pemaknaan dan konsepsi penerapannya sehingga menimbulkan keengganan pada suatu proses perbaikan. Hal ini menyebabkan upaya inovasi dan peningkatan efisiensi dalam proses pembelajaran menjadi rendah. Dampak dari hal ini adalah sulitnya peningkatan jumlah PNBPN dari uang kuliah mahasiswa, sulitnya dalam pemanfaatan sumber daya untuk pengembangan penelitian maupun layanan masyarakat, tersitanya waktu yang dimiliki dosen dan PLP untuk kegiatan rutin, sulitnya pengaturan waktu yang dapat dipergunakan oleh dosen untuk mengembangkan institusi (pengembangan manajemen), pelaksanaan penelitian, pengabdian dan upaya melakukan inovasi.
- d) Sarana dan prasarana perlu pengembangan. Gedung yang ada saat ini tidak banyak mengalami penambahan dibandingkan dengan pada saat serah terima asset dari PT. Timah Tbk ke negara pada saat penegerian. Dengan keperluan untuk penambahan jumlah program studi, jumlah mahasiswa dan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, maka luasan gedung dan lahan perlu untuk dilakukan penambahan dan perluasan. Tanpa adanya penambahan Gedung akan sulit untuk pengembangan dimasa yang akan datang.
- e) Keuangan. Jumlah PNBPN yang diterima setiap tahun masih terlalu kecil untuk pengembangan sarana dan prasarana kampus. Selain itu dengan

anggaran dana yang masih kecil, program pengembangan akademik juga sulit dilakukan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah penambahan jumlah mahasiswa melalui program-studi program studi baru maupun penggalangan dana melalui kerjasama dan produk inovasi.

1.3.3. Alternatif Kegiatan untuk Pengembangan

Kekuatan & Kesempatan

- SO.01. Peningkatan jumlah mahasiswa melalui pembukaan prodi baru dan jumlah kelas
- SO.02. Peningkatan mutu produk tugas akhir
- SO.03. Mengembangkan kegiatan inovasi untuk pemecahan teknologi
- SO.04. Peningkatan jumlah penerima beasiswa
- SO.05. Peningkatan keterlibatan industri dalam pembelajaran

Kekuatan & Ancaman

- ST.01. Meningkatkan kompetensi (mutu lulusan) melalui penerapan OBE
- ST.02. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan inovasi pembelajaran
- ST.03. Meningkatkan mutu dosen
- ST.04. Penguatan sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa
- ST.05. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian
- ST.06. Mengembangkan arah tugas akhir mahasiswa pada upaya pencapaian luaran berupa publikasi, paten dan produk teknologi

Kelemahan & Kesempatan

- WO.01. Pengembangan, pelaksanaan dan monitoring SOP & instruksi kerja
- WO.02. Pengembangan sistem informasi pendukung tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- WO.03. Meningkatkan kompetensi tendik melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi
- WO.04. Mengembangkan sistem pencatatan capaian luaran
- WO.05. Melakukan rekonstruksi kurikulum berbasis OBE
- WO.06. Menyusun penjadwalan perkuliahan dan pembelajaran
- WO.07. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana

WO.08. Mengembangkan mekanisme integrasi tugas akhir dan kegiatan penelitian dosen

WO.09. Meningkatkan jumlah dosen studi lanjut S3

Kelemahan & Ancaman

WT.01. Meningkatkan rekam jejak dosen

WT.02. Peningkatan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen

BAB II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Presiden dan Kemdiktisaintek

Visi Presiden periode 2025-2029 adalah

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi ini kemudian dicapai menjadi **delapan misi Presiden** yang dituangkan dalam Asta Cita, yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemdiktisaintek memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan PN 4, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Oleh karena itu, Kemdiktisaintek kemudian menentukan visi Kemdiktisaintek dalam Renstra 2025-2029 yang berbunyi “Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045”.

2.1.1. Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Visi Kemdiktisaintek 2025–2029 adalah terwujudnya

“Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045”.

Poin inklusif pada visi Kemdiktisaintek merujuk pada komitmen untuk secara aktif melibatkan dan mengakomodasi keberagaman individu, kelompok, dan perspektif, dengan memastikan kesetaraan akses, kesempatan, dan partisipasi bermakna bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Poin ini juga menekankan inklusivitas dan peningkatan partisipasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, penduduk daerah 3T, dan sebagainya. Inklusivitas juga tidak hanya diwujudkan secara pasif, namun juga dengan secara aktif mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari kelompok rentan. Poin adaptif diartikan sebagai pengelolaan perguruan tinggi, sains, dan teknologi yang dapat menjawab berbagai tantangan dan instabilitas, baik di tingkat nasional maupun global. Terakhir, poin berdampak menekankan bahwa pendidikan tinggi, sains, dan teknologi harus memiliki dampak yang secara riil dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Pada Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029 ini, dampak yang diharapkan secara lebih spesifik adalah Kemdiktisaintek yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, delapan Asta Cita, serta Prioritas Nasional 4 dalam RPJM Nasional 2025-2029. Secara lebih khusus, visi Kemdiktisaintek diwujudkan melalui tiga fokus yang diemban masing-masing direktorat jenderal, yaitu pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, peningkatan kapasitas dan produktivitas riset dan pengembangan, serta pengoptimalan ekosistem, pembudayaan dan solusi sains, teknologi, dan inovasi.

Kemdiktisaintek juga menetapkan lima tata nilai yang tertanam dalam Visi Kementerian. Visi Kemdiktisaintek 2025–2029 menegaskan komitmen untuk mewujudkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif dengan semangat kolaboratif, adaptif dengan tetap menjaga akuntabilitas, serta berdaya saing global sehingga berdampak nyata bagi transformasi bangsa. Inklusivitas menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, terutama kelompok rentan, dapat mengakses dan berpartisipasi secara bermakna dalam pendidikan tinggi, riset, dan inovasi. Semangat kolaboratif memperkuat inklusivitas dengan membangun sinergi berbagai pihak—dari akademisi, industri, pemerintah, hingga masyarakat sipil—dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan transparansi. Pendekatan inklusif dengan semangat kolaboratif diwujudkan melalui kemitraan lintas sektor yang mencakup keberagaman perspektif dan kebutuhan, tanpa diskriminasi, sehingga terwujud ekosistem pendidikan, sains, dan teknologi yang terbuka, adil, dan merata.

Menghadapi dinamika dan tantangan baik di tingkat nasional maupun global, pengelolaan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi haruslah adaptif dengan tetap menjaga akuntabilitas. Kelincahan untuk merespons perubahan secara cepat dan efektif, menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi yang berkembang, serta mengantisipasi tantangan masa depan dengan fleksibilitas dan ketahanan menjadi kunci keberhasilan transformasi bangsa. Namun, sifat adaptif tersebut harus tetap dibarengi dengan akuntabilitas yang tinggi. Kebijakan dan program yang dijalankan harus transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Standar etika dan profesionalitas menjadi landasan dalam menjaga kepercayaan publik.

Adapun berdaya saing global diposisikan sebagai peningkatan mutu dan keunggulan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Keunggulan ini dicapai melalui penerapan standar kualitas bertaraf dunia, inovasi yang relevan dengan kebutuhan global, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Dengan demikian, pendidikan tinggi dan iptek Indonesia tidak hanya mampu bersaing secara kompetitif di kancah global, tetapi juga berdampak—dalam arti memberi manfaat nyata dan signifikan bagi masyarakat, dunia usaha, pembangunan nasional, serta lingkungan hidup secara luas. Dampak ini mencerminkan perubahan positif yang terukur dan berkelanjutan, serta memperkuat fondasi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

A. Inklusivitas

Inklusivitas merupakan komitmen Kemdiktisaintek untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara dalam mengakses pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi tanpa membedakan latar belakang sosial-ekonomi, geografis, gender, kemampuan fisik, maupun status sosial lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, Kemdiktisaintek secara aktif menjamin kesetaraan akses dengan membuka peluang secara luas dan adil bagi semua warga negara untuk mengikuti pendidikan tinggi serta berpartisipasi dalam kegiatan riset dan inovasi, melalui berbagai skema kebijakan dan program khusus yang dirancang secara afirmatif.

Kemdiktisaintek secara tegas menyatakan keberpihakan terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat di daerah 3T penyandang disabilitas, perempuan, serta masyarakat adat. Kebijakan afirmatif diwujudkan dalam bentuk beasiswa pendidikan inklusif, layanan untuk penyandang disabilitas, serta dukungan dan pendampingan akademik. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam mengakses pendidikan tinggi berkualitas maupun layanan iptek nasional.

Prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya diterapkan secara konsisten dengan memastikan bahwa fasilitas, pendanaan, sarana dan prasarana pendidikan tinggi, riset, dan inovasi tidak terpusat di wilayah tertentu, tetapi tersebar merata hingga pelosok negeri. Pemerataan ini diwujudkan melalui pembangunan perguruan tinggi, STP, serta LPPM di luar Jawa dan wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi dari pusat kegiatan akademik dan riset

nasional, sehingga manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata.

Selain itu, Kemdiktisaintek secara tegas menjalankan prinsip non-diskriminasi, dengan menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, disabilitas, maupun latar belakang ekonomi. Untuk mencapai hal ini, Kemdiktisaintek melakukan edukasi dan kampanye kesadaran inklusivitas, meningkatkan kapasitas civitas akademika dalam memahami prinsip inklusi, serta secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan non-diskriminatif benar-benar terinternalisasi dan diaplikasikan secara nyata di setiap institusi pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.

B. Kolaboratif

Tata nilai Kolaboratif mencerminkan komitmen Kemdiktisaintek untuk secara aktif membangun sinergi antar berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Nilai ini diwujudkan melalui upaya proaktif membangun jejaring kerja sama lintas kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dunia usaha, industri, pemerintah daerah, serta lembaga internasional. Dalam praktiknya, Kemdiktisaintek mendorong semua unit kerjanya untuk secara terbuka berbagi informasi, data riset, fasilitas penelitian, dan hasil inovasi guna memperkuat kolaborasi dan menciptakan dampak yang lebih luas.

Kemdiktisaintek juga memastikan bahwa dalam setiap kerja sama yang terjalin, prinsip kesetaraan, transparansi, dan keadilan senantiasa ditegakkan. Semua pemangku kepentingan diberikan ruang dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program. Selain itu, kementerian secara rutin melaksanakan forum komunikasi yang melibatkan berbagai pihak guna menyelaraskan tujuan, menetapkan pembagian peran secara jelas, dan memastikan pencapaian hasil yang maksimal.

Lebih jauh lagi, Kemdiktisaintek senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi secara berkala untuk mengukur sejauh mana kerja sama yang terjalin memberikan manfaat nyata. Dari hasil evaluasi tersebut, Kemdiktisaintek mengambil langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas kolaborasi, sehingga budaya kerja sama yang dibangun terus berkembang dan mampu mengatasi berbagai tantangan pembangunan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan komitmen Kemdiktisaintek untuk menjalankan setiap kebijakan, program, serta kegiatan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Dalam penerapannya, nilai ini diwujudkan melalui transparansi pengelolaan sumber daya, baik anggaran, aset, maupun sumber daya manusia, yang dilakukan secara efisien, terbuka, dan terukur. Setiap

pengambilan keputusan strategis selalu didasarkan pada data, informasi, dan bukti yang jelas dan valid, serta didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi secara konsisten.

Budaya akuntabilitas juga tercermin dalam keterbukaan Kementerian terhadap evaluasi, kritik, dan masukan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya. Setiap laporan kinerja dipublikasikan secara berkala, disusun secara objektif, dan disampaikan secara transparan kepada publik, disertai analisis kritis terhadap capaian maupun kendala yang dihadapi. Seluruh aktivitas administratif, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang atau jasa, dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, bebas konflik kepentingan, serta dilandasi integritas tinggi untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, nilai akuntabilitas menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa semua sumber daya yang dikelola Kemdiktisaintek menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi, riset dan inovasi, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

D. Berdaya Saing Global

Kemdiktisaintek menjadikan nilai Berdaya Saing Global sebagai panduan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, riset, dan inovasi agar mampu bersaing dalam skala internasional, sekaligus meningkatkan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global. Nilai ini mendorong seluruh jajaran kementerian dan lembaga pendidikan tinggi untuk senantiasa berorientasi pada keunggulan, mutu, serta standar internasional dalam segala aktivitas akademik dan kelembagaan.

Perilaku utama yang diwujudkan dalam nilai ini mencakup:

1. Standardisasi Global: Melaksanakan pengembangan kurikulum, akreditasi, dan program pendidikan yang memenuhi atau melampaui standar internasional.
2. Internasionalisasi Pendidikan dan Riset: Mengembangkan program pertukaran mahasiswa, dosen tamu internasional, dan kolaborasi penelitian global untuk memperkuat jejaring akademik internasional.
3. Publikasi dan Reputasi Akademik: Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi serta peningkatan sitasi global.
4. Pengakuan Internasional: Mendukung perguruan tinggi dan institusi riset Indonesia untuk masuk ke dalam peringkat internasional (*QS World University Rankings*, *THE Impact Rankings*, dll.) melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan inovasi pembelajaran.

5. Pengembangan SDM Unggul Bertaraf Dunia: Mengembangkan program strategis (seperti Manajemen Talenta Nasional) untuk memfasilitasi dosen, peneliti, dan mahasiswa agar meraih
6. pengakuan internasional, serta meningkatkan mobilitas akademik lintas negara.
7. 6. Daya Tarik Global bagi Pendidikan Indonesia: Mengembangkan dan mempromosikan kampus-kampus unggulan Indonesia sebagai destinasi pendidikan dan riset internasional untuk mahasiswa asing serta peneliti global.

E. Berdampak

Kemdiktisaintek berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, serta aktivitas yang dijalankan tidak hanya berhenti pada pencapaian administratif atau formal semata, tetapi memberikan manfaat nyata dan signifikan bagi masyarakat, dunia usaha, pembangunan nasional, serta lingkungan hidup secara luas.

Perilaku Kunci yang Mendukung Nilai "Berdampak":

1. Fokus pada *Outcome* dan *Impact* Mengembangkan indikator evaluasi yang tidak hanya berbasis keluaran (output), tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang.
 - a. Secara berkala mengukur sejauh mana program dan kebijakan yang dilaksanakan menghasilkan perubahan positif yang signifikan bagi target sasaran.
 - b. Riset dan inovasi yang menjawab masalah nyata
 - c. Mengarahkan riset, inovasi, dan hilirisasi teknologi untuk menjawab tantangan nasional, seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan transformasi digital.
 - d. Melibatkan para pemangku kepentingan sejak awal dalam proses identifikasi masalah dan perumusan agenda riset untuk memastikan relevansi dan utilisasi hasil penelitian.
2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan untuk Solusi Sosial-Ekologis
 - a. Mengintegrasikan sains dan teknologi secara eksplisit dalam kebijakan publik dan intervensi sosial, terutama dalam menangani isu-isu kompleks seperti bencana, kerusakan lingkungan, atau ketimpangan wilayah.
 - b. Mengembangkan ekosistem inovasi berbasis kewilayahan dengan tujuan spesifik untuk mempercepat transformasi sosial-ekologis daerah-daerah yang paling membutuhkan.
3. Peningkatan Kesejahteraan melalui Hilirisasi Riset

- a. Secara aktif mendukung dan memfasilitasi transfer teknologi hasil penelitian ke dunia usaha, industri kecil menengah, *start-up*, dan komunitas.
 - b. Mengembangkan STP dan LPPM yang tidak sekadar menjadi pusat penelitian, tetapi juga katalisator pengembangan ekonomi lokal dan nasional.
4. Evaluasi Dampak yang Terukur dan Akuntabel
- a. Melaksanakan evaluasi dampak secara rutin menggunakan metode evaluasi yang akuntabel, transparan, dan kredibel, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program.
 - b. Melaporkan secara terbuka kepada publik mengenai dampak yang telah dicapai, termasuk tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program-program strategis.

2.1.2. Misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek menetapkan tiga misi untuk mendukung terwujudnya transformasi bangsa sesuai dengan Visi Kementerian periode 2025-2029. Sesuai dengan Misi Pembangunan yang tertera dalam RPJP Nasional 2025-2045, transformasi ini merujuk kepada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Dalam hal ini, Kemdiktisaintek menetapkan misi pertama, yaitu “Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing” sebagai upaya untuk mendukung transformasi ekonomi. Kemdiktisaintek menetapkan misi kedua berupa “Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat” untuk mendukung transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Terakhir, Kemdiktisaintek menetapkan misi ketiga, yaitu “Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi berintegritas”, untuk membantu mewujudkan transformasi tata kelola. Tiga misi tersebut dilaksanakan sesuai dengan rincian berikut.

A. Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing

Misi ini ditetapkan untuk mewujudkan pembangunan SDM yang unggul untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan misi tersebut, Kemdiktisaintek perlu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi. Misi ini juga ditetapkan untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia memiliki kualitas yang baik, sehingga memiliki daya saing dan relevansi dengan tantangan global. Misi ini mencakup semua perguruan tinggi yang berada di bawah koordinasi Kemdiktisaintek, termasuk perguruan tinggi akademis, vokasi, dan profesi. Dalam rangka mencapai misi ini, Kemdiktisaintek akan melaksanakan berbagai kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Perluasan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan merata: Mengembangkan kebijakan afirmasi untuk wilayah 3T, kelompok ekonomi kurang mampu, serta kelompok rentan lainnya. Skema dukungan mencakup penyaluran biaya operasional pendidikan yang optimal, revitalisasi dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi, dan perluasan program beasiswa secara lebih terarah dan transparan. Kebijakan strategis lain yang akan diambil untuk mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi meliputi pengembangan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) secara terstandarisasi dan mendorong pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). Kemdiktisaintek juga berkomitmen untuk mewujudkan perguruan tinggi sebagai ruang yang aman dan inklusif dengan melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan Permendikburistek No. 55/2024 dan mendukung pembentukan unit layanan disabilitas di kampus.
2. Peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi unggul: Mendorong dan mendukung perguruan tinggi di seluruh Indonesia mencapai akreditasi unggul melalui perbaikan sistem pembelajaran, tata kelola, dan peningkatan kompetensi dosen. Strategi ini juga mencakup pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, inovasi pembelajaran, serta peningkatan infrastruktur pembelajaran sesuai dengan SNDIKTI.
3. Penguatan otonomi perguruan tinggi: Memperluas ruang gerak akademik dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan inovasi secara mandiri sesuai kebutuhan nasional dan global, mendukung keleluasaan perguruan tinggi dalam mengelola sumber daya, keuangan, dan kebijakan internal dengan tata kelola yang efektif, serta menjamin perlindungan terhadap kebebasan akademik dan budaya ilmiah yang sehat.
4. Pengembangan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): Mendorong perguruan tinggi untuk membuka dan mengembangkan program studi di bidang STEM dengan kualitas unggul, serta memperkuat integrasi kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global dan kebutuhan industri
5. Link and match perguruan tinggi dengan dunia industri dan kerja: Mengembangkan program yang meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja dalam dan luar negeri, melalui skema magang industri, kemitraan strategis perguruan tinggi-industri, serta kurikulum yang berorientasi industri dan kewirausahaan.
6. Internasionalisasi perguruan tinggi: Memfasilitasi peningkatan mobilitas dosen dan mahasiswa, kemitraan riset internasional, serta meningkatkan jumlah perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam peringkat internasional (QS World Ranking, THE Impact Ranking SDGs, dan sebagainya).
7. Transformasi digital dan inovasi pembelajaran: Mempercepat digitalisasi perguruan tinggi melalui penguatan teknologi informasi dalam pembelajaran dan tata kelola kampus, pengembangan pembelajaran daring, serta mendorong inovasi pendidikan berbasis teknologi digital

yang dikombinasikan dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa.

B. Mewujudkan Riset, Pengembangan, Sains, Teknologi, dan Inovasi yang Berdampak dan Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Misi ini ditetapkan untuk memastikan bahwa riset, pengembangan, sains, dan teknologi tidak hanya berkembang secara akademik, namun dapat memberikan dampak positif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui misi ini, Kemdiktisaintek berupaya memastikan bahwa riset yang dilakukan memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan nasional, berdaya saing global, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Misi ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung interaksi produktif antara perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha dan industri (DUDI), pemerintah, serta masyarakat dalam menghasilkan riset dan inovasi yang memiliki dampak nyata di tingkat nasional dan internasional.

Kemdiktisaintek juga berupaya untuk mengintegrasikan sains, teknologi, dan inovasi ke dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perguruan tinggi diharapkan memiliki dampak nyata yang dimulai dari wilayah sekitarnya, sehingga perguruan tinggi didorong untuk mengembangkan keunggulan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya. Kemdiktisaintek juga mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi bagi seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong pembentukan kebijakan pemerintah yang berbasiskan riset dan berorientasi dampak.

Strategi pelaksanaan misi ini meliputi:

1. Penguatan Kapasitas Talenta Riset
 - a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi teknis dosen serta peneliti melalui pendidikan lanjut (S3/pascadoktoral), pelatihan, dan kolaborasi internasional.
 - b. Melaksanakan skema pengembangan talenta riset dan inovasi dari tahap pra-pembibitan sampai tahap penguatan talenta unggul sesuai dengan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.
 - c. Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program-program pengembangan kapasitas berbasis kompetensi global, termasuk program mobilitas dosen dan peneliti internasional, pelatihan teknologi terbaru, serta pengelolaan talenta riset dan inovasi unggul.
2. Peningkatan Produktivitas Kelembagaan Iptek dan Inovasi
 - a. Memperkuat peran STP, LPPM, PUI-PT, dan lembaga diseminasi sains dan teknologi sebagai pusat kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan, intermediasi, dan mengelola hasil riset.

- b. Mengembangkan fungsi *Technology Transfer Office* (TTO) secara nasional untuk mengoordinasikan TTO di perguruan tinggi.
3. Penyusunan Regulasi yang Berorientasi Dampak: Regulasi yang disusun oleh Kemdiktisaintek tidak dapat hanya mempertimbangkan kewajiban administrasi, namun harus disusun dengan tujuan memaksimalkan dampak positif di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemdiktisaintek juga menghimpun aspirasi dan umpan balik secara berkala dari para pemangku kepentingan, seperti melalui Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Penguatan Riset yang Relevan dan Berdampak
 - a. Menetapkan agenda riset strategis berbasis kebutuhan sektor prioritas nasional seperti energi baru dan terbarukan, pangan, maritim, kesehatan, teknologi digital, lingkungan hidup, dan pertahanan.
 - b. Mengembangkan skema pendanaan berbasis tantangan (*challenge based funding*) yang berfokus pada solusi dan mengarahkan riset untuk mengatasi masalah mendesak yang dihadapi masyarakat secara multidisipliner.
 - c. Memastikan hasil riset tidak hanya fokus pada publikasi, tetapi juga pada paten, teknologi tepat guna, dan prototipe produk yang siap dikomersialisasi.
5. Percepatan Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Inovasi
 - a. Mengembangkan mekanisme dana padanan (*matching fund*) untuk mewujudkan kolaborasi perguruan tinggi dan industri dalam melakukan penelitian yang memiliki potensi nilai guna dan ekonomi.
 - b. Memperkuat kolaborasi *pentahelix* (akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat, media) untuk mempercepat transfer teknologi dari laboratorium ke pasar.
 - c. Mendukung terbentuknya struktur insentif yang mendukung percepatan komersialisasi inovasi secara lintas institusi, seperti insentif pajak untuk riset dan investasi inovasi dari dunia usaha.
6. Peningkatan Tata Kelola Penelitian dan Inovasi
 - a. Menyempurnakan sistem pengelolaan riset di perguruan tinggi agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
 - b. Memperkuat integrasi data riset nasional dan peningkatan akses terhadap informasi riset melalui prinsip *open science*.
 - c. Evaluasi berkala terhadap produktivitas riset dan dampak inovasi melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis *outcome*.
7. Peningkatan Peran Perguruan Tinggi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah:

- a. Memperkuat keterlibatan perguruan tinggi melalui LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dalam merumuskan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan sektoral daerah, khususnya melalui kerja sama dan penguatan lembaga-lembaga intermediasi iptek.
 - b. Peningkatan kapasitas LLDikti sebagai *regional impact-hub* untuk mutu, inovasi, dan tata kelola perguruan tinggi.
8. Peningkatan Daya Saing Global Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset
- Menginisiasi program akselerasi internasionalisasi institusi riset dan pendidikan tinggi, peningkatan jumlah publikasi internasional, paten internasional, kolaborasi riset global, serta partisipasi aktif dalam jaringan dan konsorsium riset internasional.

C. Mewujudkan Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Berintegritas

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kemdiktisaintek berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui tata kelola yang baik, program-program di bidang pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, serta sains dan teknologi dapat membawa dampak terhadap para pemangku kepentingan di sekitar Kemdiktisaintek yang setidaknya meliputi perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.

Strategi pelaksanaan misi ini dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Kementerian yang Transparan dan Akuntabel dengan tata kelola internal yang mematuhi standar-standar seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Hukum, Indeks Reformasi Birokrasi, dan sebagainya.

2.1.3. Tujuan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Demi melaksanakan misinya, Kemdiktisaintek membagi ketiga misi tersebut menjadi empat tujuan. Pada misi pertama, pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing diturunkan menjadi dua tujuan; “Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu” yang berfokus pada perluasan akses yang merata, serta “Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi” yang berfokus pada kualitas lulusan sebagai dampak dari pendidikan tinggi. Pada misi kedua, terwujudnya pengembangan sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat diturunkan menjadi tujuan “Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing”. Terakhir, misi berupa terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas diturunkan menjadi tujuan “Memperkuatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan

akuntabel” untuk memastikan bahwa kinerja Kemdiktisaintek dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hubungan antara misi dan tujuan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Hubungan Misi dan Tujuan Kemdiktisaintek

Misi	Tujuan
Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing	Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi
Mewujudkan riset, pengembangan sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing
Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas	Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

A. Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan Tinggi yang Bermutu

Pada periode 2025-2029, Kemdiktisaintek mengutamakan peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi secara merata dan inklusif sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju 2045. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa pendidikan tinggi berkualitas tidak hanya tersedia bagi kelompok tertentu di perkotaan atau kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas saja, tetapi juga dapat dijangkau secara luas oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T, serta kelompok rentan yang selama ini belum mendapatkan kesempatan optimal. Pemerataan akses pendidikan tinggi akan diwujudkan melalui perluasan kapasitas perguruan tinggi negeri maupun swasta, dengan memperhatikan relevansi terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan nasional. Perguruan tinggi akan didorong untuk mengembangkan program studi unggulan yang mampu menjawab tantangan lokal dan global serta memperluas jangkauan pendidikan melalui implementasi sistem pembelajaran berbasis digital, termasuk pendidikan tinggi jarak jauh, guna mengatasi keterbatasan geografis dan memperluas kesempatan belajar bagi semua kalangan.

Kemdiktisaintek juga akan menjalankan kebijakan afirmasi secara konsisten, terutama dengan memperkuat program pemberian beasiswa penuh, bantuan biaya pendidikan, dan subsidi pendidikan tinggi untuk mahasiswa dari keluarga ekonomi rendah, masyarakat adat, mahasiswa penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi berkualitas, sehingga disparitas akses pendidikan tinggi antar kelompok sosial-ekonomi dapat berkurang secara signifikan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi akan dilakukan melalui percepatan peningkatan kualitas pengajaran, penguatan kompetensi dosen, serta pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Perguruan tinggi di berbagai daerah akan didorong secara aktif untuk mencapai akreditasi unggul, termasuk akreditasi internasional, sehingga tercipta kualitas pendidikan tinggi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, fokus khusus diberikan pada pengembangan pendidikan tinggi berbasis STEM sebagai landasan utama dalam menciptakan lulusan yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di pasar kerja global.

Untuk menunjang upaya tersebut, kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah dan sektor industri akan terus diperkuat melalui berbagai mekanisme kemitraan, termasuk skema pendanaan bersama, program magang, dan pengembangan pusat-pusat keunggulan regional. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan pasar kerja, sekaligus meningkatkan dampak pendidikan tinggi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pencapaian pada tujuan ini akan diukur melalui indikator “Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi”.

B. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Tinggi

Tujuan strategis kedua dalam Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029 adalah meningkatkan meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi. Setelah sebelumnya berfokus dalam memperluas akses pendidikan tinggi, Kemdiktisaintek juga perlu memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi memiliki pengetahuan, keahlian, dan karakter yang baik sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Demi mewujudkan tujuan ini, Kemdiktisaintek perlu memastikan bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan di era transformasi dan mampu menjawab tantangan global. Pada porsi pendidikan tinggi akademik, hal ini dilakukan dengan cara memperkuat dan menambah fokus pada bidang STEM sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan. Melalui langkah ini, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki keahlian tinggi yang nantinya juga digunakan dalam bidang dengan keahlian tinggi.

Perhatian lebih perlu diberikan untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan pendidikan vokasi, program studi STEM, pendidikan tenaga kependidikan, serta program studi kesehatan. Kemdiktisaintek akan melakukan penguatan produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan melalui peningkatan kualitas dan jumlah wahana pendidikan, program studi, serta tenaga kerja lulusan pendidikan kesehatan. Di sisi lain, Kemdiktisaintek juga melaksanakan agenda revitalisasi pendidikan vokasi dengan cara melakukan peningkatan mutu pendidikan vokasi melalui program-program *link and match*

yang relevan dengan kebutuhan industri. Pencapaian pada tujuan ini akan diukur melalui indikator “Persentase pekerja lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah-tinggi”.

C. Meningkatnya Kontribusi Sains, Teknologi, dan Inovasi yang Berdampak dan Berdaya Saing

Tujuan ketiga Kemdiktisaintek dalam periode 2025–2029 diarahkan pada peningkatan kontribusi iptek dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing. Tujuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa evaluasi periode 2020-2024 memang menunjukkan progres dalam bidang iptek dan inovasi, namun perkembangan tersebut belum berhasil memberikan dampak nyata dan manfaat yang ideal bagi masyarakat, industri, dan pemerintah. Oleh karena itu, Kemdiktisaintek akan mengarahkan sains, teknologi, dan inovasi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional berdasarkan RPJM Nasional yang mengacu pada bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, yaitu: Pangan - Pertanian; Energi - Energi Baru dan Terbarukan; Kesehatan - Obat; Transportasi; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pertahanan dan Keamanan; Material Maju; Kemaritiman; Kebencanaan; dan Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan.

Berdasarkan 10 bidang fokus tersebut, Kemdiktisaintek juga akan mendukung amanat RPJM Nasional terkait *flagship* Prioritas Riset Nasional (PRN) untuk menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis, di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir skala industri; bahan bakar alternatif dari kelapa sawit; kendaraan listrik termasuk baterai lithium ion dan sistem *fast charging*; kereta cepat; pesawat amfibi; pesawat terbang tanpa awak; bahan baku obat; pabrik garam industri; pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya budaya wilayah dengan pendekatan multidisiplin; inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik); penerapan teknologi untuk pencegahan bencana dan mitigasi pascabencana; pengembangan budaya riset ilmiah dan inovasi; dan penguasaan Teknologi Garda Depan untuk bidang-bidang strategis seperti kesehatan dan farmasi, teknologi digital dan *cyber security*, material maju, energi baru terbarukan, tenaga nuklir, pertahanan dan keamanan, serta keantariksaan.

Pencapaian pada tujuan ini akan diukur melalui indikator “Peringkat Indeks Inovasi Global”. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam Renstra periode ini dilakukan secara holistik dan memperhatikan berbagai dimensi. Pertama, peningkatan perlu dilakukan pada dimensi talenta atau sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi. Pada dimensi ini, Kemdiktisaintek akan melakukan intervensi kebijakan secara strategis untuk memastikan bahwa pengembangan talenta berjalan dengan baik bagi bibit talenta, talenta potensial, serta talenta unggul. Oleh karena itu, intervensi akan dimulai dengan

pengembangan bibit talenta melalui SMA Unggul Garuda serta dukungan bagi pelajar dan mahasiswa untuk meraih prestasi di bidang sains dan teknologi.

Dalam aspek sumber daya manusia, upaya peningkatan kompetensi dosen dan peneliti menjadi fokus utama Kemdiktisaintek, dengan tetap merancang peningkatan dan perbaikan strategi pada aspek pengembangan tenaga kependidikan, baik di perguruan tinggi maupun di internal Kementerian. Jumlah dosen dan peneliti yang berkualifikasi doktor (S3) serta bersertifikasi kompetensi riset akan terus ditingkatkan secara konsisten selama periode ini.

Pada dimensi kelembagaan, Kemdiktisaintek akan melakukan intervensi melalui empat jenis lembaga. Pertama, Kemdiktisaintek akan konsisten melakukan peningkatan kapasitas LPPM sebagai lembaga pengelola penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Kedua, Kemdiktisaintek akan melakukan penguatan peran *Science Techno Park* (STP) untuk melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi. Ketiga, Kemdiktisaintek akan melakukan penguatan kontribusi perguruan tinggi berdasarkan keunggulan, khususnya lewat PUI-PT dan PUAPT (Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi). Keempat, Kemdiktisaintek juga akan meningkatkan kapasitas berbagai lembaga yang melakukan fungsi diseminasi sains dan teknologi. Penguatan keempat jenis lembaga ini diharapkan dapat mendukung peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi di perguruan tinggi.

Terakhir, dimensi kebijakan juga menjadi perhatian dalam mendukung terwujudnya tujuan ini. Sebagaimana Perpres No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, pada Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai bagian dari Kelompok Kementerian II, fungsi pertamanya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Penetapan ini menunjukkan pentingnya suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian, di mana dalam hal ini Kemdiktisaintek akan berperan dalam peningkatan kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset.

D. Menguatnya Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Tujuan terakhir pada Rencana Strategis Kemdiktisaintek 2025-2029 adalah untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel pada pendidikan tinggi, sains dan teknologi, serta riset dan pengembangan. Pencapaian tujuan ini akan diukur melalui indikator berupa “Indeks Reformasi Birokrasi”. Dalam hal ini, Kemdiktisaintek berkomitmen untuk mendukung agenda-agenda reformasi birokrasi nasional dalam bidang hukum, transformasi digital, transparansi keuangan, dan lain sebagainya. Penguatan tata kelola juga akan diwujudkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa setiap perguruan tinggi dijalankan sesuai dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

2.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemdiktisaintek menetapkan enam sasaran strategis yang menjadi pengejawantahan dari empat tujuan pada Rencana Strategis 2025-2029. Sasaran-sasaran strategis ini menjadi panduan untuk unit-unit di Kemdiktisaintek untuk menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian. Tujuan meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu diturunkan menjadi sasaran “Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas”, sedangkan tujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi diwujudkan melalui sasaran “Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi”. Tujuan ketiga, yaitu meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing diturunkan menjadi tiga sasaran strategis yang disesuaikan dengan ruang lingkup Kemdiktisaintek dalam ekosistem iptek dan inovasi. Pertama, berfokus pada pengembangan talenta, adalah “Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi”. Kedua, berfokus pada pengembangan aspek kelembagaan, adalah “Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi”. Ketiga, berfokus pada produk kebijakan yang disusun oleh Kementerian, diwujudkan melalui sasaran “Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset”. Terakhir, tujuan menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel diturunkan menjadi sasaran strategis “Meningkatnya tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel”. Pembagian sasaran strategis berdasarkan tujuan induknya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis Kemdiktisaintek

Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas
Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi
Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing	Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi
	Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi
	Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset
Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dalam menetapkan enam sasaran strategis tersebut, Kemdiktisaintek telah mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target

dan indikator. Risiko-risiko ini meliputi risiko endogen yang berasal dari dinamika internal Kementerian maupun risiko eksogen yang berasal dari lingkungan eksternal yang kompleks dan saling terkait. Maka dari itu, Renstra Kemdiktisaintek ini dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko, perlakuan risiko, dan penanggung jawab perlakuan risiko pada Tabel 1.7 di bawah ini.

Tabel 2.3 Identifikasi Risiko Sasaran Strategis Kemdiktisaintek

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PIC
SS 1. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas	IKSS 1.1. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT)	Meningkatnya angka putus sekolah dari kelompok kelas menengah	Pengembangan program beasiswa/bantuan pendidikan yang juga menasar kelas menengah	Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
		Ketidaktepatan penyaluran beasiswa/sasaran program bantuan pendidikan	Pelibatan berbagai pihak untuk pembaruan, verifikasi, dan validasi data penerima beasiswa secara berkala	Pusat Data dan Informasi
		Potensi intervensi politik dalam proses seleksi calon penerima beasiswa	Memperkuat tata kelola dan regulasi untuk meminimalkan dampak negatif dari intervensi politik	Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
		Kebijakan bantuan sarana prasarana belum berbasis spasial	Menyusun kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana berbasis spasial	Direktorat Sumber Daya
		Ketidaksiapan perguruan tinggi di luar Jawa untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana perguruan tinggi sesuai prosedur sehingga berpotensi menjadi KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	Pembinaan terhadap perguruan tinggi di luar Jawa agar siap menerima bantuan pembangunan sarana prasarana sesuai prosedur	Direktorat Kelembagaan
		Sulit menghitung dampak dukungan sarana prasarana terhadap peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Mengembangkan metode dan sistem pengukuran serta evaluasi yang terstandarisasi untuk mengukur secara akurat dampak dukungan sarana dan prasarana terhadap peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.	Direktorat Sumber Daya
		Bencana (alam, non-alam, sosial) yang mengganggu pelaksanaan pendidikan	Pendekatan komunikasi dan edukasi pada masyarakat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PIC
SS 2. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi	IKSS 2.1. Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (a) total; (b) karyawan atau wirausaha	Berkurangnya kesempatan kerja formal akibat disrupsi teknologi dan otomatisasi	Penguatan <i>tracer study</i> untuk memetakan kebutuhan pasar kerja	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
		Ketidakmerataan kesempatan kerja antarwilayah	Penguatan koordinasi lintas kementerian dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian untuk <i>link and match</i> dan fasilitasi <i>job placement</i> nasional berbasis data lulusan dan permintaan (<i>demand</i>) pasar kerja	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
	IKSS 2.2. Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang bekerja di bidang sesuai pendidikan dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Rendahnya adopsi teknologi digital pada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	Peningkatan literasi digital dosen dan mahasiswa agar memiliki kecakapan teknologi	Pusat Data dan Informasi
		Infrastruktur digital (jaringan listrik, internet) terbatas dan belum merata, terutama di luar Pulau Jawa	Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Digital, PLN) untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur digital di perguruan tinggi kawasan prioritas	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
		Data <i>baseline</i> pendidikan tinggi yang usang (<i>outdated</i>) berpotensi menyesatkan penetapan target peningkatan mutu	Pembaruan, verifikasi, dan validasi data <i>baseline</i> secara berkala	Pusat Data dan Informasi
SS 3. Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi	IKSS 3.1. Jumlah SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) per juta penduduk	Potensi <i>brain drain</i>	Melakukan retensi talenta: insentif karier, jejaring riset, dan kolaborasi internasional	- Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan - Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PIC
	IKSS 3.2. Jumlah SDM pendidikan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional	Masa studi melebihi batas ketentuan	- Pengaturan dan pemantauan ketat masa studi, fasilitasi program percepatan studi - Identifikasi program studi tertentu yang masa studinya cenderung lama untuk program penyiapan dosen sebelum lanjut studi	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
		Keterbatasan sumber pendanaan riset dari APBN, rawan jika terjadi pemotongan anggaran	Diversifikasi sumber pendanaan riset, optimalisasi penggunaan dana yang ada	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
		Pelanggaran integritas riset	Penguatan sosialisasi kode etik dan sistem penjaminan mutu riset, disertai penerapan sistem deteksi plagiarisme	- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
		Bencana (alam, non-alam, sosial) yang mengganggu pelaksanaan pendidikan	Pendekatan komunikasi dan edukasi pada masyarakat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa
SS 4. Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi	IKSS 4.1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat <i>THE Impact Rankings</i> SDGs: (a) Top 300 (b) Top 600 (c) Top 1000	Resistensi masyarakat terhadap penelitian di lapangan	Inovasi metode sosialisasi kepada masyarakat di lapangan	Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
		Keterbatasan pendanaan dari APBN dan potensi pelaksanaan program tersendat akibat keterlambatan pencairan dana	- Diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi penggunaan dana yang ada - Optimalisasi dana yang ada dengan penyaluran anggaran tepat sasaran dan verifikasi penggunaan dana melalui mekanisme akuntabilitas yang ketat - Pengembangan sistem dana talangan untuk mitigasi keterlambatan pencairan	- Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan - Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PIC
		Keterbatasan data riset (<i>research</i>), pengelolaan (<i>stewardship</i>), penyebaran informasi (<i>outreach</i>), dan pengajaran (<i>teaching</i>) terkait SDGs di perguruan tinggi akibat fragmentasi kebijakan dan resistensi berbagi data antarlembaga	Mendorong harmonisasi kebijakan dan pengembangan platform kolaborasi data yang terintegrasi	- Pusat Data dan Informasi
		Rendahnya kepercayaan industri terhadap hasil riset perguruan tinggi	Membangun komunikasi dan pemahaman bersama antara industri dan perguruan tinggi	Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan
		Pembajakan/penggunaan tanpa izin hasil riset perguruan tinggi	Fasilitasi pendampingan pendaftaran HKI dan peningkatan kesadaran perlindungan kekayaan intelektual	- Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan; - Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
SS 5. Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset	IKSS 5.1. Jumlah perumusan kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset	Potensi jangka waktu penetapan dan perumusan kebijakan yang terlalu lama karena adanya resistensi dari berbagai pihak terkait	Melakukan berbagai pendekatan dengan berbagai pihak terkait	Biro Hukum
		Pelanggaran integritas riset, seperti plagiarisme, fabrikasi data, dan etika penelitian yang buruk mengurangi kredibilitas dan validitas hasil riset	Penguatan sosialisasi kode etik dan sistem penjaminan mutu riset, disertai penerapan sistem deteksi plagiarisme	- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
		Penyalahgunaan hasil riset (misal <i>cherry-picking</i>), pengabaian hasil riset kritis atau bertentangan dengan pandangan dominan pemerintah	- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi - Melibatkan komite ilmiah independen dalam verifikasi hasil	- Biro Hukum - Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Sekretariat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PIC
		Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan (seperti masyarakat, peneliti) terkait penulisan Naskah Akademik/Naskah Urgensi	Edukasi terkait pentingnya Naskah Akademik/Naskah Urgensi yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan berbasis riset di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi	Biro Hukum
SS 6. Meningkatkan tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	IKSS 6.1. Indeks Reformasi Birokrasi	Realisasi anggaran yang kurang maksimal dan terlambat	Pemantauan realisasi anggaran secara berkala dan pelaporan sistematis	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal
		Konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak sesuai aturan	Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk penguatan kepatuhan (<i>compliance</i>) dan budaya integritas	- Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal

A. Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Tinggi Berkualitas

Dalam rangka merealisasikan tujuannya untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi, Kemdiktisaintek menetapkan sasaran strategis berupa meningkatkannya partisipasi pendidikan tinggi. Peningkatan partisipasi ini direalisasikan baik secara umum, maupun secara khusus dengan memperhatikan prinsip inklusivitas dan keadilan. Oleh karena itu, sasaran strategis ini tidak hanya direalisasikan dengan menambah jumlah mahasiswa baru sesuai dengan proporsi populasi, namun juga dengan memperhatikan representasi geografis, terutama dari daerah tertinggal, dan representasi dari latar belakang sosio-ekonomi keluarga, terutama masyarakat tidak mampu. Kemdiktisaintek juga berkomitmen pada keterjangkauan biaya pendidikan tinggi serta penetapan biaya pendidikan tinggi yang berkeadilan, tidak hanya untuk masyarakat miskin, namun juga untuk masyarakat kelas menengah yang masih rentan.

Sasaran strategis ini berhadapan dengan risiko utama berupa meningkatnya angka putus sekolah khususnya dari kelompok kelas menengah yang dapat secara langsung menurunkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT). Ketidaktepatan dalam penyaluran beasiswa dan sasaran program bantuan juga menjadi kendala yang membuat dukungan tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Risiko lainnya yaitu potensi intervensi politik dalam proses seleksi penerima beasiswa, yang berpotensi menurunkan transparansi dan keadilan dalam pemberian bantuan. Kebijakan latihan sarana prasarana yang belum berbasis pertimbangan spasial dan ketidaksiapan perguruan tinggi di luar Jawa

dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana dapat menghambat pemerataan fasilitas pendidikan. Risiko bencana, baik bencana alam (antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor), bencana non-alam (antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit), maupun bencana sosial (meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror), pun dapat mendadak menghambat pelaksanaan pendidikan.

Untuk mengurangi dampak risiko tersebut, langkah mitigasi dilakukan dengan mengembangkan program beasiswa yang turut menyasar kelompok kelas menengah, melakukan pembaruan, verifikasi, dan validasi data penerima beasiswa secara berkala, memperkuat tata kelola dan regulasi untuk meminimalkan intervensi politik, serta menyusun kebijakan bantuan sarana prasarana yang berbasis spasial agar tepat sasaran. Pemantauan kesiapan dan pembinaan khusus kepada perguruan tinggi di luar Jawa dikembangkan agar perguruan tinggi terkait siap menerima dukungan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana sesuai prosedur. Selain itu, edukasi masyarakat menghadapi bencana dan mengurangi dampak gangguan akibat bencana menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan efektif.

B. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi

Sasaran strategis ini dirumuskan untuk merealisasikan peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi diwujudkan dengan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, agar lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat menjawab kebutuhan dan tantangan di level lokal, nasional, dan global. Pada sasaran ini, Kemdiktisaintek tidak hanya berfokus pada pendidikan tinggi akademik, tetapi juga berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi, termasuk pendidikan tenaga kependidikan dan pendidikan tenaga medis dan kesehatan. Demi menjawab tantangan global dan kebutuhan nasional, Renstra Kemdiktisaintek periode 2025-2029 ini berfokus pada pendekatan STEAM pada pendidikan tinggi, agar lulusan pendidikan tinggi dapat berkontribusi secara langsung di bidang-bidang keahlian tinggi yang menjadi prioritas nasional.

Risiko dalam sasaran strategis ini berkaitan dengan berkurangnya kesempatan kerja formal akibat disrupsi teknologi dan otomatisasi, yang mengancam keterserapan lulusan di dunia kerja. Ketidakmerataan kesempatan kerja antarwilayah dapat menyebabkan lulusan di daerah tertentu kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, disertai keterbatasan infrastruktur digital, khususnya di luar Pulau Jawa, menimbulkan hambatan pembelajaran yang modern dan mutakhir, dapat mengakibatkan lulusan pendidikan tinggi kian tertinggal dalam hal kompetensi penguasaan teknologi. Di samping itu, kompetensi lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri dapat menurunkan relevansi pendidikan tinggi. Penggunaan data *baseline* pendidikan tinggi yang

sudah usang juga berpotensi menyesatkan target peningkatan mutu. Berbagai risiko tersebut dapat mengakibatkan kesenjangan yang semakin lebar antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar, sehingga sasaran mutu pendidikan dan relevansi lulusan sulit dicapai.

Perlakuan yang dijalankan termasuk penguatan *tracer study* untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara nyata sekaligus memantau keberhasilan lulusan di pasar kerja. Bersamaan dengan itu, koordinasi lintas kementerian, di antaranya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian, dilakukan untuk penguatan *link and match* serta memfasilitasi penempatan kerja nasional berbasis data kebutuhan lulusan dan pasar kerja. Peningkatan literasi digital bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa diupayakan secara masif, didukung dengan kolaborasi pengembangan infrastruktur digital, terutama di area/wilayah prioritas, bersama kementerian terkait. Selain itu, serta pembaruan, verifikasi, dan validasi data *baseline* dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi penetapan target mutu.

C. Meningkatnya Kapasitas Talenta Riset, Sains, dan Teknologi

Demi mewujudkan peningkatan kontribusi iptek dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing global, Kemdiktisaintek menetapkan sasaran strategis berupa peningkatan kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada konteks sasaran strategis ini, pengembangan talenta dimulai dengan mengidentifikasi dan menginkubasi bibit talenta melalui SMA Unggul Garuda. Pada level perguruan tinggi, berbagai intervensi akan dilakukan untuk mengembangkan kualifikasi dan kompetensi mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mewujudkan SDM iptek di perguruan tinggi yang berdaya saing global.

Risiko-risiko esensial pada sasaran strategis ini mencakup potensi terjadinya *brain drain* yang menyebabkan berkurangnya jumlah dan kualitas SDM Iptek nasional, masa studi yang melebihi batas menghambat regenerasi talenta, serta keterbatasan pendanaan riset pada APBN yang fluktuatif dan rawan pemotongan anggaran. Pelanggaran integritas riset seperti plagiarisme dan fabrikasi data dapat menurunkan kredibilitas hasil riset dan institusi. Bencana alam, non-alam, dan konflik sosial lokal juga berpotensi menghambat penyelenggaraan pendidikan dan riset. Dampak berbagai risiko tersebut adalah terhambatnya peningkatan kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi yang berdaya saing global, serta rendahnya kualitas dan produktivitas riset nasional.

Untuk meredam dampak tersebut, perlakuan risiko diarahkan pada upaya retensi talenta melalui pemberian insentif karier, pembentukan jejaring riset, dengan kolaborasi tingkat internasional menjadi prioritas. Masa studi diatur dan dipantau dengan ketat, disertai fasilitasi program percepatan studi khusus bagi program studi yang masa studinya cenderung lama. Diversifikasi sumber pendanaan riset terus diupayakan, sementara optimalisasi penggunaan dana yang tersedia juga diupayakan. Penguatan sosialisasi kode etik dan sistem penjaminan mutu secara serius dijalankan, seiring dengan penerapan sistem

deteksi plagiarisme. Edukasi dan mediasi juga dilakukan untuk mengatasi dampak bencana alam dan non-alam serta konflik sosial.

D. Meningkatnya Produktivitas Kelembagaan Iptek dan Inovasi

Kemdiktisainstek, demi mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya riset dan pengembangan, menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi. Fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan menjadi penting dalam menjembatani riset yang dilakukan di perguruan tinggi dengan kebutuhan pemerintah, dunia industri, dan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa riset dapat menghasilkan inovasi yang berdampak bagi para penerima manfaat tersebut. Kemdiktisainstek mendukung pengembangan kapasitas LPPM, STP, PUI-PT, serta lembaga diseminasi sains dan teknologi secara strategis, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal, nasional, dan global.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, terdapat beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis ini. Risiko pertama adalah adanya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan penelitian di lapangan, yang dapat menghambat pengumpulan data dan implementasi program riset. Risiko kedua adalah keterbatasan pendanaan dari APBN serta potensi tersendatnya pelaksanaan program akibat keterlambatan pencairan dana, yang berakibat pada terhambatnya kelancaran kegiatan riset dan inovasi. Selanjutnya, fragmentasi kebijakan dan resistensi dalam berbagi data antarlembaga menimbulkan keterbatasan data riset (*research*), pengelolaan (*stewardship*), diseminasi/penyebaran informasi (*outreach*), dan pengajaran (*teaching*) terkait SDGs di perguruan tinggi. Padahal, kelengkapan data ini sangatlah krusial dalam *The Times Higher Education* (THE), *THE Impact Rankings Sustainable Development Goals* (SDGs). *THE Impact Rankings SDGs* dihitung dengan mengombinasikan skor pendidikan tinggi pada SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dan tiga SDGs teratas lainnya menjadi satu skor keseluruhan. Setiap SDG dievaluasi menggunakan metrik untuk penelitian (*research*), pengelolaan (*stewardship*), penyebaran informasi (*outreach*), dan pengajaran (*teaching*), berdasarkan data yang disediakan oleh universitas dan sumber-sumber eksternal lain, seperti Scopus.

Selain itu, rendahnya kepercayaan industri terhadap hasil riset perguruan tinggi juga dapat menurunkan tingkat hilirisasi riset dan pemanfaatan hasil inovasi. Terakhir, risiko pembajakan atau penggunaan tanpa izin hasil riset perguruan tinggi mengancam perlindungan kekayaan intelektual dan peluang komersialisasi inovasi.

Dampak dari berbagai risiko ini apabila tidak diatasi adalah menurunnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi secara signifikan, berkurangnya kepercayaan dan keterlibatan mitra industri, serta terhambatnya pengembangan dan pemanfaatan hasil riset demi mendukung pembangunan

nasional. Perguruan tinggi berpotensi gagal untuk masuk dan berkompetisi dalam peringkat global seperti *THE Impact Rankings SDGs*, yang dapat berdampak pada reputasi dan daya saing institusi.

Untuk mengurangi dampak risiko tersebut, perlakuan risiko yang diterapkan meliputi inovasi metode sosialisasi yang efektif dan adaptif kepada masyarakat di lapangan guna mengurangi resistensi serta meningkatkan dukungan sosial terhadap kegiatan riset. Diversifikasi sumber pendanaan juga menjadi prioritas, diiringi dengan optimalisasi penggunaan dana yang ada dan penyaluran anggaran secara tepat sasaran dengan mekanisme akuntabilitas dan verifikasi yang ketat. Lebih lanjut, pengembangan sistem dana talangan dirancang untuk mitigasi keterlambatan pencairan dana agar program riset tidak terganggu. Untuk mengatasi fragmentasi data dan kebijakan, dilakukan harmonisasi kebijakan serta pengembangan platform kolaborasi data terintegrasi yang mendukung penyebaran informasi dan pengajaran terkait SDGs secara efektif di perguruan tinggi. Penguatan komunikasi dan pemahaman bersama dengan industri penting untuk membangun kepercayaan dan memperluas kemitraan riset. Fasilitasi pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan peningkatan kesadaran perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian dari perlakuan proaktif. Selain itu, berbagai pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan.

Pemantapan sosialisasi kode etik riset dan sistem penjaminan mutu disertai penerapan sistem deteksi plagiarisme secara menyeluruh memperkuat integritas riset kelembagaan. Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi menjadi hal penting, termasuk melibatkan komite ilmiah independen dalam verifikasi hasil riset. Edukasi yang menyasar pentingnya Naskah Akademik/Naskah Urgensi turut digalakkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan berbasis riset, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih valid dan aplikatif.

E. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Berbasis Riset

Inovasi yang berbentuk produk bukan merupakan satu-satunya manfaat sains dan teknologi. Sains dan teknologi juga dapat menjadi dasar bagi kebijakan. Maka dari itu, Kemdiktisaintek menetapkan sasaran strategis berupa utilisasi riset dalam perumusan kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Dalam hal ini, Kemdiktisaintek mendorong ekosistem kebijakan yang berdasarkan riset empiris, agar kebijakan yang dibentuk dapat memberikan dampak yang positif dan terukur setidaknya dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sasaran strategis ini berhadapan dengan risiko yang meliputi lamanya waktu penetapan dan perumusan kebijakan akibat resistensi dari berbagai pihak, pelanggaran integritas riset seperti plagiarisme dan fabrikasi data yang berdampak negatif pada kredibilitas hasil riset. Selain itu, riset yang tidak

relevan dengan tantangan nasional dan penyalahgunaan hasil riset (misalnya *cherry-picking*), serta pengabaian riset kritis berpotensi membuat kualitas kebijakan merosot. Kurangnya pemahaman terhadap proses penyusunan kebijakan berbasis riset juga menghambat partisipasi efektif dari para pemangku kepentingan (seperti publik/masyarakat umum dan peneliti). Padahal, partisipasi publik yang bermakna sangatlah penting dalam perumusan kebijakan berbasis bukti lantaran dapat memperkaya substansi kebijakan terkait.

Dampak risiko ini dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang tepat, luput menangani akar masalah, dan tidak berdampak luas sesuai tujuan pembangunan nasional. Penanganan risiko dilakukan melalui pendekatan intensif dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, penguatan kode etik riset dan sistem mutu, penerapan deteksi plagiarisme, mendorong riset berbasis tantangan nasional, serta kolaborasi riset antarlembaga. Transparansi dan akuntabilitas perumusan kebijakan diperkuat dengan melibatkan komite ilmiah independen dalam verifikasi hasil riset. Edukasi kepada pemangku kepentingan dilakukan agar partisipasi dan pemahaman meningkat.

F. Meningkatnya Tata Kelola Kementerian yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk memastikan bahwa kinerja Kemdiktisaintek dalam lima tahun ke depan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kemdiktisaintek juga berkomitmen untuk mendukung agenda-agenda birokrasi nasional, seperti dengan mewujudkan kinerja yang baik sesuai dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Hukum, dan sebagainya. Kemdiktisaintek juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua lembaga yang berada dalam ekosistem Kementerian, seperti perguruan tinggi, mematuhi prinsip partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi, sains, dan teknologi yang baik.

Dalam mencapai sasaran strategis untuk meningkatkan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, terdapat beberapa risiko utama yang dapat menghambat pencapaian sasaran ini. Risiko pertama adalah realisasi anggaran yang kurang maksimal dan terlambat, yang berpotensi menyebabkan program-program kementerian tidak berjalan sesuai rencana dan sasaran strategis tidak tercapai secara optimal. Keterlambatan dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran akan berdampak pada keterlambatan pelayanan publik, berkurangnya kepercayaan *stakeholders*, serta ketidakseimbangan dalam alokasi dan prioritas program. Risiko kedua adalah munculnya konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak sesuai aturan, yang dapat menggerus integritas, menghambat pengambilan keputusan yang objektif, serta merusak reputasi kementerian. Konflik kepentingan juga menjadi ancaman bagi transparansi dan akuntabilitas, serta menurunkan efektivitas implementasi kebijakan dan program.

Dampak dari realisasi anggaran yang tidak optimal dan konflik kepentingan tersebut jika tidak dikendalikan adalah kegagalan dalam mencapai indeks reformasi birokrasi yang diharapkan, serta melemahnya budaya integritas dan kepatuhan di lingkungan kementerian, hingga potensi sanksi dan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga pengawas.

Untuk mitigasi risiko tersebut, langkah strategis yang diambil adalah melakukan pemantauan realisasi anggaran secara berkala dengan pelaporan yang sistematis dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana dan dapat segera diidentifikasi apabila terjadi keterlambatan atau penyimpangan sehingga dapat dilakukan perbaikan tepat waktu. Selain itu, implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi, sekaligus membangun budaya integritas yang kuat. SPI memastikan pengawasan yang konsisten, mekanisme pelaporan yang efektif, serta tindakan korektif yang cepat dapat dijalankan untuk mencegah dan menangani konflik kepentingan maupun pelanggaran tata kelola. Dengan pendekatan mitigasi ini, tata kelola kementerian diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga sasaran strategis tercapai secara optimal dan memberikan dampak positif bagi kemajuan sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

2.2.1. Visi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

Visi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung merupakan suatu cita-cita panjang yang menjadi arah pengembangan. Visi, misi, sasaran dan tujuan didirikannya Polman Babel tertuang dalam Statuta Polman Babel. Visi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah:

“politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi di tingkat global”

2.2.2. Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tertuang dalam Statuta Polman Babel. Dalam rangka mendukung misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maka misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan;

- b. menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa;
- c. menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan yang handal dengan berdasar pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas; dan
- d. mengembangkan jejaring kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional.

Hubungan antara Misi Kemdiktisantik dengan misi Polman Babel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Hubungan Misi Kemdiktisantik dan Misi Polman Babel

Misi Kemdiktisantik	Misi Polman Babel
Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing	menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan
Mewujudkan riset, pengembangan sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat	menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa mengembangkan jejaring kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional
Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas	menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan yang handal dengan berdasar pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas

2.2.3. Tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

Tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tertuang dalam Statuta Polman Babel. Dalam rangka mendukung tujuan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maka tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah:

- a. menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. menghasilkan produk penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing bangsa;
- c. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang handal, bersih, dan terpercaya dengan berdasar pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas;
- d. mewujudkan kerja sama yang memenuhi prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2.5 Hubungan Tujuan Kemdikristek dan Tujuan Polman Babel

Tujuan Kemdikristek	Tujuan Polman Babel
Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu	menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan
Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi	mewujudkan kerja sama yang memenuhi prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional
Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing	menghasilkan produk penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing bangsa
Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang handal, bersih, dan terpercaya dengan berdasar pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas

2.2.4. Sasaran Strategis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

Sebagai implementasi dan pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis Kemdikristek, maka sasaran strategis yang ditetapkan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Relevansi Sasaran Strategis Kemdikristek dengan Sasaran Strategis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

Sasaran Strategis Kemdikristek	Sasaran Strategis Polman Babel
SS 1. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas	SPB 1. Meningkatkan APK, kualitas dan jumlah lulusan
SS 2. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi	SPB 2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan
	SPB 3. Meningkatkan peringkat Akreditasi Institusi dan Program Studi
SS 3. Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi	SPB 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
SS 4. Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi	SPB 5. Meningkatkan Kualitas dan Keluaran Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
SS 5. Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset	
SS 6. Meningkatnya tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SPB 6. Meningkatkan tata kelola yang baik dan berkualitas sebagai perwujudan Good University Governance

Sedangkan mitigasi identifikasi resiko dari ketidaktercapaian sasaran strategis Polman Babel yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Identifikasi Risiko Sasaran Strategis Polman Babel

Sasaran Strategis Polman Babel	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PIC
SPB 1. Meningkatkan APK, kualitas	Banyaknya pendaftar yang tidak lulus Penerimaan Mahasiswa Baru	Peningkatan kuota mahasiswa baru melalui prodi baru atau jumlah kelas	Jurusan

Sasaran Strategis Polman Babel	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PIC
dan jumlah lulusan	Meningkatnya angka putus sekolah dari kelompok kelas menengah	Program beasiswa atau penurunan UKT	BAKK
	Lulusan tidak memenuhi kualifikasi pengguna	Pelaksanaan program sertifikasi	UPA UKOM
SPB 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan	Lulusan tidak memenuhi kualifikasi pengguna	Pelaksanaan program sertifikasi	UPA UKOM
		Integrasi program peningkatan soft-skill dalam pembelajaran	UPA KWN
	Mahasiswa tidak mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan	Meningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana	BAPKU Jurusan
	Proses pembelajaran tidak sesuai dengan yang ditetapkan	Penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar	UPA TIK UPA Bahasa
SPB 3. Meningkatkan peringkat Akreditasi Institusi dan Program Studi	Institusi dan Program Studi menerima sanksi dari pemerintah	Pengajuan akreditasi sebelum masa berlaku habis	P2MPP
	Peringkat akreditasi tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan	Pelaksanaan penjaminan mutu secara rutin dan komprehensif	P2MPP
	Penurunan minat pendaftar mahasiswa baru	Pengajuan akreditasi sebelum masa berlaku habis	P2MPP
SPB 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah dosen bergelar doktor kurang dari target IKU	Memberikan motivasi dan bantuan persiapan beasiswa	Jurusan BAPKU
	Jumlah dosen berpangkat lektor kepala atau professor kurang dari target IKU	Memberikan insentif dan bantuan publikasi karya ilmiah	P3KM
	Citra perguruan tinggi turun	Peningkatan jumlah dosen doktor, dan lektor kepala	Jurusan
SPB 5. Meningkatkan Kualitas dan Keluaran Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah output program penelitian dan pengabdian masyarakat tidak mencapai target IKU	Memberikan insentif dan bantuan publikasi karya ilmiah	P3KM
	Tidak adanya karya inovasi yang diakui oleh pihak eksternal	Memberikan insentif dan bantuan publikasi karya ilmiah	P3KM
	Tidak adanya pendapatan dari produk inovasi	Perbaikan tata kelola keuangan, kepegawaian dalam mendukung generate income	UPA PTPU
SPB 6. Meningkatkan tata kelola yang baik dan berkualitas sebagai perwujudan Good University Governance	Ada masalah secara hukum	Melaksanakan tata kelola keuangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	BAPKU BAKK
	Pelaporan-pelaporan sebagai kewajiban institusi pemerintah tidak dapat dilakukan	Penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi	UPA TIK

BAB III.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan Kementerian/Lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Renstra Kemdiktisaintek harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam RPJM Nasional 2025-2029.

A. Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

RPJM Nasional 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Pada tahap ini, arah kebijakan difokuskan untuk memperkuat fondasi transformasi pada 7 (tujuh) aspek berikut:

1. Transformasi sosial berupa penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;
2. Transformasi ekonomi berupa hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau yang memuat pelaksanaan transisi energi tahap pertama, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah, serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa;
3. Transformasi tata kelola berupa kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrasi partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia yang berkaitan dengan penguatan supremasi hukum, penguatan lembaga demokrasi, dan pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi yaitu memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan;
6. Pembangunan wilayah dan sarana prasarana melalui peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur strategis, serta penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas;
7. Kestinambungan pembangunan dengan penekanan pada reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.

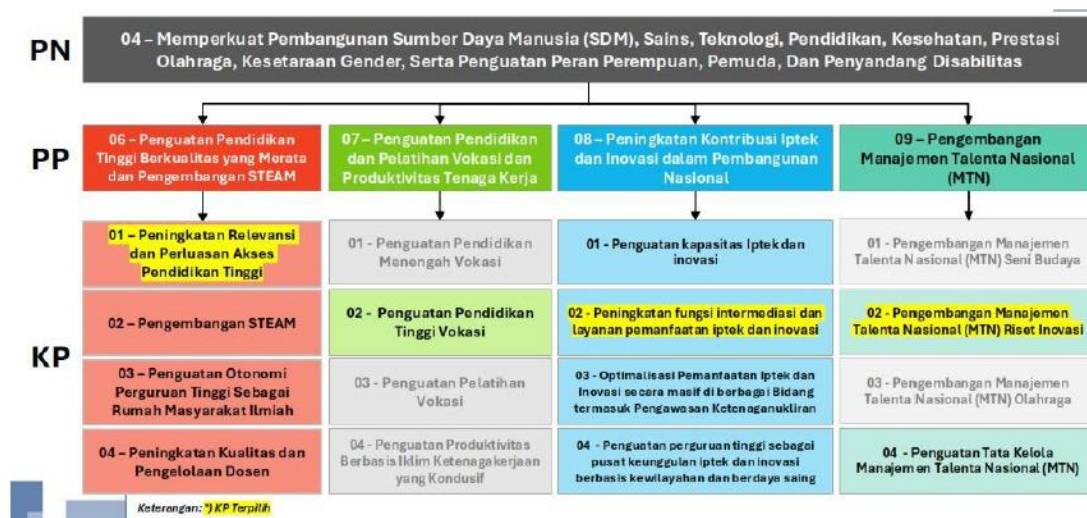
Dari ketujuh aspek tersebut, Kemdiktisaintek memberikan dukungan pada agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif dengan karakter individu yang sehat, cerdas, kreatif, resilien, unggul, dan berdaya saing.

Transformasi ekonomi dititikberatkan pada aspek iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Kontribusi iptek dan inovasi perlu diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, penguatan kapasitas dan produktivitas iptek dan inovasi, serta optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di berbagai bidang.

Selanjutnya, dokumen RPJM Nasional 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi dari Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan
6. mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
7. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
8. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
9. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

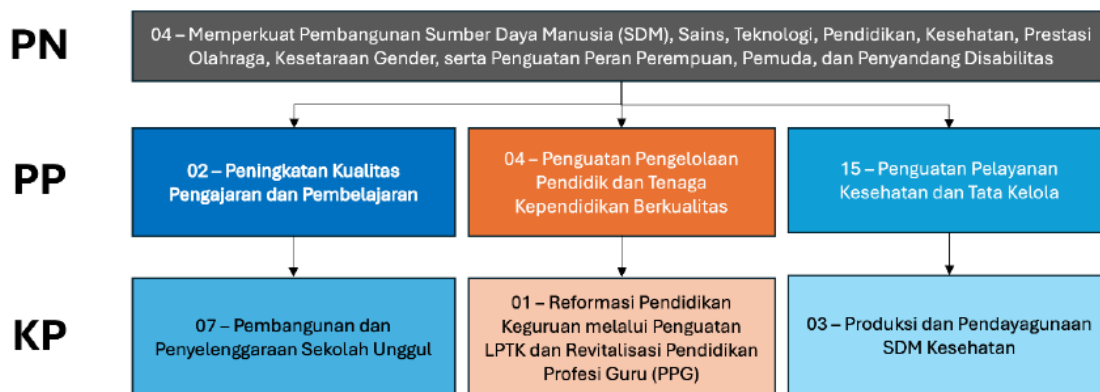
Dari 8 (delapan) Prioritas Nasional tersebut, Kemdiktisaintek memberikan dukungan pada Prioritas Nasional 4 yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, dan pendidikan. Kemdiktisaintek secara khusus mendapat amanat untuk mendukung empat Program Prioritas (PP) yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional 4 sebagaimana dapat dilihat pada berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam RPJM Nasional 2025-2029 Sumber: Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Setiap Program Prioritas yang diamanatkan kepada Kemdiktisaintek diturunkan menjadi rincian Kegiatan Prioritas sebagai penekanan untuk masing-masing program. Program Prioritas 06 (PP 06) tentang Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan STEAM memiliki penekanan pada Kegiatan Prioritas tertentu, di antaranya: (a) Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi; (b) Pengembangan *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM); (c) Penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah; dan (d) Peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen. Program Prioritas 07 (PP 07) tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki penekanan pada satu Kegiatan Prioritas, yaitu Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi. Program Prioritas 08 (PP 08) tentang Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional memiliki penekanan pada Kegiatan Prioritas: (a) Penguatan kapasitas iptek dan inovasi; (b) Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi; (c) Optimalisasi pemanfaatan Iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang termasuk Pengawasan Ketenaganukliran; dan (d) Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing. Program Prioritas 09 (PP 09) tentang Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) memiliki penekanan pada dua Kegiatan Prioritas, yaitu (a) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi serta (b) Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN).

Selain keempat Program Prioritas di atas, terdapat tiga Program Prioritas lain di mana Kemdiktisaintek turut berkontribusi dalam mendukung ketercapaian Prioritas Nasional 4. Program Prioritas yang dimaksud sebagaimana pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Program Prioritas Kemdiktisaintek lainnya yang mendukung Program Prioritas dan Indikator Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Iptek
Sumber: Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Program Prioritas 02 (PP 02) tentang Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran menekankan pada Kegiatan Prioritas yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul. Sementara itu, untuk Program Prioritas 04 (PP 04) tentang Penguatan dan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas, Kemdiktisaintek akan menyelenggarakan Kegiatan Prioritas untuk reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan LPTK dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Terakhir, Program Prioritas 15 (PP 15) tentang Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola, intervensi Kegiatan Prioritas yang dapat dilaksanakan Kemdiktisaintek adalah yang berkaitan dengan produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan.

B. Amanat Regulasi Nasional bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Inovasi

Selain merujuk pada dokumen RPJM Nasional 2025-2029, arah kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang akan dilaksanakan Kemdiktisaintek juga mempertimbangkan beberapa amanat regulasi yang telah diundangkan dan masih berlaku. Beberapa di antaranya adalah:

1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. UU ini mengamanatkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kemajuan bangsa. UU Sisdiknas sedang dalam proses revisi dengan pendekatan kodifikasi yang

mengintegrasikan ketentuan dari tiga undang-undang lain bidang pendidikan seperti UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 18/2019 tentang Pesantren.

2. Pelaksanaan amanat UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan amanat regulasi tersebut, arah kebijakan Kemdiktisaintek periode 2025-2029 difokuskan pada penguatan ekosistem riset, teknologi, dan inovasi nasional melalui pengembangan kapasitas kelembagaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan jumlah SDM Iptek khususnya dosen perguruan tinggi, serta optimalisasi pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset untuk mendukung kebutuhan strategis nasional. Arah kebijakan dalam konteks ini juga mencakup dorongan terhadap pendanaan riset yang berkelanjutan dan kompetitif, penguatan tata kelola dan etika penelitian, serta penetapan prioritas riset sesuai kebutuhan nasional seperti Energi, Pertahanan, Digitalisasi: AI dan Semikonduktor, Hilirisasi dan Industrialisasi, Kesehatan, Pangan, Maritim, serta Material dan Manufaktur Maju.
3. Kemdiktisaintek turut berperan dalam penguatan Manajemen Talenta Nasional, khususnya terkait talenta riset dan inovasi, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 108/2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. Beberapa arah kebijakan yang diamanatkan dalam regulasi tersebut antara lain:
 - a. Perluasan *talent pool* dan daya pikat talenta melalui perbaikan regulasi terkait beban kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk fasilitasi jalur jenjang karier khusus dosen peneliti;
 - b. Peningkatan jumlah Talenta potensial lulusan pendidikan tinggi yang berkiprah di bidang Riset dan Inovasi;
 - c. Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi Talenta melalui pemberian beasiswa jalur cepat S1 menuju S3 serta dukungan pendanaan riset mahasiswa S1/D4 tingkat akhir;
 - d. Penguatan kolaborasi SDM Iptek yang mencakup optimalisasi pemanfaatan platform kolaborasi seperti Kedaireka;
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana esensial untuk MTN dengan pengembangan STP sebagai pusat kolaborasi komersialisasi produk inovasi.
4. Kemdiktisaintek akan berperan dalam revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Lingkup arah kebijakan yang masih dalam koridor kewenangan Kemdiktisaintek akan diarahkan pada beberapa aspek, seperti penyesuaian dan penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi vokasi, penyelenggaraan akses pemagangan dan praktik kerja industri, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Kerja, serta fasilitasi uji kompetensi dan sertifikat

kompetensi/profesi bagi lulusan pendidikan tinggi vokasi. Selain itu, memperhatikan struktur Perpres No. 68/2022 yang memberikan kesempatan bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi sendiri sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja di sektor masing-masing, maka Kemdiktisaintek akan menjalin koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

5. PP No. 57/2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (PTKL). Regulasi tersebut menetapkan bahwa seluruh kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di Indonesia menjadi tugas dan fungsi kementerian, dalam hal ini Kemdiktisaintek.
6. UU No. 17/2023 tentang Kesehatan Pasal 208 memberikan amanat bagi kementerian yang membidangi pendidikan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan tinggi dalam pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Arah kebijakan nasional dalam melaksanakan pembinaan tersebut dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Selain itu, Pasal 209 juga memberikan amanat kepada Kemdiktisaintek dengan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium dalam penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

A. Arah Kebijakan Kemdiktisaintek dalam Mendukung PHTC

Sebagai upaya mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan 8 (delapan) PHTC yang akan dijalankan secara intensif dalam lima tahun ke depan. Kemdiktisaintek memegang peran strategis pada empat program yang relevan, yaitu:

1. Program 3 – Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kemdiktisaintek mendukung pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan pendekatan sains dan teknologi. Program ini ditujukan untuk membangun lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional. Perguruan tinggi didorong untuk melakukan riset terapan di bidang pertanian, memperkuat hilirisasi hasil inovasi pertanian, dan mengembangkan teknologi tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Peran pendidikan tinggi dalam program ini mencakup penyediaan tenaga ahli, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat petani dan pemerintah daerah.

2. Program 4 – Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Kemdiktisaintek turut berperan dalam pembangunan sekolah-sekolah unggulan yang terintegrasi di setiap kabupaten. Hal ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah, termasuk dalam bidang pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan. Dalam mendukung agenda ini, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi berkontribusi langsung melalui program pengembangan SMA Unggul Garuda, baik dalam bentuk pembangunan sekolah baru maupun transformasi sekolah yang sudah ada. Melalui Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi, Kemdiktisaintek akan membangun 20 unit SMA Unggul Garuda Baru yang didesain dengan standar akademik internasional, sarana laboratorium modern, serta ekosistem inovasi yang mendukung pembinaan talenta saintek sejak jenjang pendidikan menengah. Sekolah ini akan menjadi talent pool strategis untuk mengisi jalur pra-pembibitan dalam kerangka Manajemen Talenta Nasional, sesuai amanat Perpres No. 108/2024.

Selain itu, melalui Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif, Kemdiktisaintek akan memfasilitasi transformasi 80 sekolah menjadi SMA Unggul Garuda, dengan penguatan kurikulum transformatif, model pembelajaran berbasis riset, serta peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik. Transformasi ini merupakan strategi percepatan (*fast-track*) untuk memperluas jangkauan SMA Unggul Garuda di berbagai daerah, sehingga pembinaan talenta saintek tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, melainkan juga merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan fokus pada pembangunan dan transformasi SMA Unggul Garuda sebagai *centre of excellence* di bidang sains dan teknologi, Ditjen Saintek memastikan bahwa dukungan terhadap PHTC dapat menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan kualitas talenta sains dan teknologi sejak jenjang pendidikan menengah. Upaya ini akan memperkuat fondasi menuju ekosistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi yang unggul dan berdaya saing global pada periode 2025–2029.

3. Program 5 – Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Kemdiktisaintek mendukung program ini dengan penguatan dan perluasan KIP Kuliah sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui KIP Kuliah, kementerian berkontribusi pada pengurangan beban ekonomi rumah tangga ekonomi lemah sekaligus membuka jalan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi.
4. Program 6 – Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. Kemdiktisaintek memberikan dukungan pada Program 6 dengan memastikan skema tunjangan kinerja dosen sebagai langkah

peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja. Kebijakan tunjangan kinerja dosen akan diintegrasikan dengan skema Manajemen Talenta Nasional, sehingga peningkatan kesejahteraan diikuti dengan program peningkatan kapasitas, kinerja, dan insentif berbasis merit. Selain itu, melalui agenda transformasi kelembagaan, kementerian mendorong kemandirian perguruan tinggi agar mampu mengelola sumber daya dan pembiayaan secara lebih berdaya. Kemandirian ini membuka ruang bagi penerapan skema remunerasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai kinerja.

Untuk mendukung tercapainya PHTC, arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek meliputi:

1. Memperkuat SDM Unggul

SDM unggul dihasilkan melalui upaya gotong royong menyiapkan talenta masa depan untuk menopang pembangunan dan industri nasional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di antaranya dengan pemberian KIP kuliah dan KIP kuliah daerah, 1 riset diikuti oleh 1 mahasiswa S3 melalui PMDSU, revitalisasi pendidikan STEM, dan program mahasiswa berdampak untuk pemimpin masa depan Indonesia emas.

2. Kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi

Mendorong hilirisasi produk akademik melalui program saintek untuk inovasi berdasarkan skema pembinaan/afirmasi, penugasan, dan relevansi dengan Asta Cita, memperkuat platform dan skema pendanaan padanan, serta penguatan riset terapan di PT Vokasi.

3. Pusat riset dan akselerator kebijakan strategis

Mengembangkan kampus yang dapat memberikan solusi berbasis riset untuk kebijakan publik dan pembangunan nasional. Beberapa hal yang telah dan akan terus dilakukan di antaranya melalui penguatan Pusat Antar Perguruan Tinggi, pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (*Science Techno Park*), serta penguatan komunikasi sains.

4. Perluasan delegasi kewenangan ke perguruan tinggi

Otonomi perguruan tinggi menjadi landasan utama agar tiga *agregator* “berdampak” sebagaimana tiga poin sebelumnya—memperkuat SDM Unggul, kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, dan kampus sebagai pusat riset dan akselerator kebijakan strategis—dapat terwujud. Beberapa aspek yang diperluas sebagai delegasi kewenangan ke perguruan tinggi meliputi tata kelola kelembagaan, pembelajaran transformatif, tata kelola keuangan, mentoring perguruan tinggi, dan penguatan otonomi PT Vokasi. Dengan otonomi ini kampus dapat lebih inklusif, adaptif, transformatif, dan berdampak.

B. Arah Kebijakan Kemdiktisaintek dalam Mendukung Program Prioritas Presiden

Dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan Tujuh Belas Program Prioritas Nasional sebagai agenda strategis pembangunan. Kemdiktisaintek mengambil peran sentral dalam mendukung dan mengakselerasi pencapaian sejumlah program prioritas tersebut. Enam di antaranya secara langsung berkaitan dengan penguatan sektor pendidikan tinggi, sains, teknologi, serta dampaknya terhadap masyarakat luas, yaitu:

1. Prioritas 1 – Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Kemdiktisaintek mendorong kontribusi nyata dari perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menciptakan inovasi teknologi untuk pertanian, energi terbarukan, dan konservasi air. Program riset dan pengabdian masyarakat diarahkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian nasional dalam sektor-sektor vital ini.
2. Prioritas 8 – Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. Inilah jantung peran Kemdiktisaintek. Peningkatan mutu pendidikan tinggi, percepatan transformasi digital di kampus, dan pengembangan ekosistem riset yang terintegrasi menjadi bagian dari strategi besar menuju masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge society).
3. Prioritas 10 – Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kemdiktisaintek berkomitmen pada pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kampus-kampus didorong untuk membangun sistem pembelajaran yang ramah gender, menyediakan layanan disabilitas, serta membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.
4. Prioritas 11 – Menjamin pelestarian lingkungan hidup. Melalui kurikulum hijau, riset keberlanjutan, serta pengembangan laboratorium hidup (living labs), perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat edukasi dan inovasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemdiktisaintek juga mendukung penelitian-penelitian yang berbasis ekologi dan perubahan iklim.
5. Prioritas 15 – Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim. Kemdiktisaintek mengambil peran penting dalam proses hilirisasi melalui integrasi hasil riset ke dalam industri nasional. Fokusnya adalah menghasilkan inovasi yang aplikatif, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat penciptaan nilai tambah dalam negeri, terutama di sektor maritim dan sumber daya alam. Kebijakan yang dilakukan adalah intervensi strategis dan berkelanjutan, terintegrasi dan berdampak nyata dalam mendukung swasembada pangan, energi, kesehatan (obat, alat kesehatan dan tenaga kesehatan), pertahanan, maritim, biomaterial dan bahan baku industri

(termasuk logam dan mineral), teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Untuk itu intervensi strategis diarahkan pada:

- a. [SDM] Sumber daya manusia dengan kapasitas sains dan teknologi yang unggul.
- b. [Program] Program penelitian prioritas dan strategis serta link and match dengan kebutuhan kemajuan kemanusiaan, masyarakat dan keekonomian.
- c. [Peta Jalan] Melakukan redesain peta jalan penelitian dan pengembangan teknologi yang selaras dengan sektor prioritas.
- d. [Ekosistem] Pembentukan ekosistem riset dan pengembangan dalam membangun dan mempercepat penyelesaian permasalahan kemanusiaan dan bangsa serta wilayah.
- e. [Kolaborasi] Penguatan Kerjasama dengan industri–para pemangku kepentingan (termasuk BRIN dan mitra luar negeri) sehingga riset dan pengembangan memberikan dampak seluas-luasnya.

Terdapat enam program prioritas riset dan pengembangan sesuai dengan RPJM Nasional 2025-2029 dalam menumbuhkan dan memperkuat budaya riset:

- a. Peningkatan talenta penelitian dan pengembangan (peneliti unggul, peneliti terekognisi dan peneliti dengan produktivitas tinggi).
 - b. Penguatan penelitian dan pengembangan (penelitian dasar dan terapan).
 - c. Peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan kerjasama dengan DUDI (riset berdampak–ajakan industri dan dorongan teknologi, kemitraan industri serta hiliriset-pendanaan padanan).
 - d. Pengembangan Kawasan sains dan teknologi (STP) (pusat inkubasi dan akselerasi pertumbuhan Perusahaan rintisan–start-up, spin out, TTO dll).
 - e. Pengembangan kemitraan dengan K/L Pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, dan industri.
 - f. Penguatan pengabdian kepada Masyarakat pada suatu kawasan.
6. Prioritas 17 – Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga. Kemdiktisaintek mendorong pendidikan tinggi tidak hanya pada aspek sains dan teknologi, tetapi juga pada pelestarian kebudayaan nasional. Perguruan tinggi seni, lembaga riset budaya, serta kegiatan mahasiswa di bidang seni dan olahraga difasilitasi untuk menjadi ruang ekspresi dan pencapaian prestasi tingkat nasional hingga internasional.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi Kemdiktisaintek 2025–2029 diarahkan untuk menciptakan visi Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak. Kerangka regulasi yang disusun akan diarahkan untuk mewujudkan misi yang meliputi pemerataan akses pendidikan tinggi

berkualitas, relevan, dan berdaya saing; mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat; serta mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, beberapa regulasi dari tingkat Undang-Undang sampai Kepmendiktisainstek yang diprioritaskan dalam periode tahun 2025–2029 tertuang dalam Lampiran 3. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2025-2029.

Secara umum, kerangka regulasi yang mendasari penyelenggaraan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi saat ini dibangun atas beberapa instrumen utama, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Sejumlah tantangan regulasi masih mengemuka dan memerlukan perhatian jangka menengah. Salah satunya adalah UU Sisdiknas yang telah berusia lebih dari dua dekade perlu dilakukan revisi menyeluruh untuk merespons perkembangan kebutuhan tata kelola pendidikan nasional. Selain itu, revisi diperlukan untuk mengatasi persoalan fragmentasi regulasi pendidikan yang terpecah dalam berbagai undang-undang. Melalui pendekatan kodifikasi, revisi UU Sisdiknas bersama tiga regulasi lainnya–UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No. 18/2019 tentang Pesantren–dapat menjadi fondasi untuk memperjelas posisi dan otonomi pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan nasional yang melingkupi berbagai aspek termasuk penjaminan mutu, pendanaan, dan integrasi pendidikan tinggi dengan agenda riset nasional. Penyempurnaan regulasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi memiliki ruang pengelolaan yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada hasil riset yang berdampak bagi masyarakat dan perekonomian.

Pada aspek penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Kemdiktisainstek menaruh perhatian pada perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan RPP tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di mana kedua rancangan peraturan tersebut merupakan amanat dari Pasal 12 UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kedua RPP tersebut sangat penting sebagai panduan pemajuan dan penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia untuk jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kemdiktisainstek akan aktif mengawal karena memiliki peran signifikan dalam implementasi RPP tersebut. Hal ini sejalan dengan posisi Kemdiktisainstek sebagai kementerian teknis yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Perpres No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun

2024-2029, pada Pasal 9 disebutkan bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Kemdiktisaintek akan secara aktif terlibat dalam proses penyusunan RPP sebagai bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan pula revisi terhadap sejumlah regulasi, khususnya di tingkat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian dari Kemendikbudristek menjadi Kemdiktisaintek.

Kemdiktisaintek juga akan mendorong serta mengawal kerangka regulasi yang dirumuskan oleh kementerian lain namun berkaitan erat dengan bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, seperti Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Penelitian dan Rancangan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional Akademis.

Sementara itu, pada penyusunan peraturan setingkat Keputusan Menteri, terdapat perbedaan tahapan dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya pada tidak diperlukannya kegiatan uji publik serta tidak adanya proses pengajuan pengundangan oleh Kementerian Hukum.

Sebagai penekanan, kerangka regulasi Kemdiktisaintek disusun untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan berbasis riset dan berdampak. Prinsip berbasis riset mengharuskan perumusan regulasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) wajib dilengkapi Naskah Akademik sesuai UU No. 12/2011 dan UU No. 13/2022, sementara regulasi di bawahnya dapat menggunakan Naskah Urgensi. Proses ini dilengkapi dengan keterlibatan publik secara bermakna untuk memperkuat legitimasi dan kualitas regulasi. Prinsip berdampak menekankan pentingnya penerapan metodologi untuk menilai dampak dari suatu kebijakan, misalnya *Regulatory Impact Assessment* (RIA), guna menilai potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari regulasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemdiktisaintek sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemdiktisaintek harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan koordinasi kelembagaan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal.

Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

3.5. Sasaran dan Strategi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

Dalam rangka untuk mencapai Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi maka disusunlah Sasaran Strategis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (SPB) sebagaimana berikut:

- SPB 1. Meningkatkan APK, kualitas dan jumlah lulusan
- SPB 2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan
- SPB 3. Meningkatkan peringkat Akreditasi Institusi dan Program Studi
- SPB 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- SPB 5. Meningkatkan Kualitas dan Keluaran Program Penelitian dan Pengabdian Kepada
- SPB 6. Meningkatkan tata kelola yang baik dan berkualitas sebagai perwujudan Good University Governance Masyarakat

Adapun jabaran strategi yang dicanangkan untuk mencapai sasaran strategis tersebut yaitu:

3.5.1. Peningkatan APK, Kualitas dan Jumlah Lulusan

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan peningkatan APK, kualitas dan jumlah lulusan adalah sebagai berikut:

- a. bertambahnya jumlah lulusan, jumlah mahasiswa, jumlah program studi, jumlah jenjang pendidikan program studi, luasan lahan dan luasan gedung;
- b. kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan, tenaga kerja dan perkembangan teknologi;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai bertambahnya jumlah lulusan, jumlah mahasiswa, jumlah program studi, jumlah jenjang pendidikan program studi, luasan lahan dan luasan gedung yaitu:

- a. penyusunan naskah akademik dan studi kelayakan program studi baru;
- b. pembukaan program studi – program studi baru;
- c. persiapan pembukaan program studi pasca sarjana;
- d. penyusunan Masterplan, DED, Amdal dan dokumen lainnya terkait pembangunan gedung di Kampus 2 dan Kampus BBIS;
- e. pembangunan gedung baru melalui skema SBSN, DIPA atau skema keuangan lainnya di Kampus 2 dan Kampus BBIS;
- f. pengusulan formasi ASN untuk menambah jumlah dosen dan tenaga kependidikan;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan, tenaga kerja dan perkembangan teknologi yaitu:

- a. evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu, industri, asosiasi, organisasi profesi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- b. pembelajaran berbasis RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, project/problem based learning, OBE (outcome based education) atau istilah lainnya;
- c. peningkatan kerjasama dengan industri & masyarakat untuk magang, perekrutan alumni, pengajar dari unsur praktisi, kuliah tamu, penelitian, pengembangan sarana prasarana dan lainnya;
- d. pemutakhiran dan perawatan sarana dan prasarana.
- e. meningkatkan keterserapan lulusan, melalui *job-placement-center* dan *career-center*;
- f. melakukan sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;
- g. peningkatan kualitas pelaksanaan magang;
- h. peningkatan proyek akhir dalam bentuk:
 - 1) melibatkan proyek akhir dalam kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dosen;
 - 2) pelibatan proyek akhir untuk penyelesaian masalah di industri dan/atau masyarakat;
 - 3) peningkatan output dan hasil proyek akhir berupa buku ber-ISBN, seminar, jurnal, hak cipta dan/atau paten;
 - 4) indeksasi laporan dan hasil proyek akhir ke Google Scholar, repository atau index lainnya;
 - 5) tata kelola proyek akhir berbasis IT;
- i. pengukuran kepuasan pengguna lulusan yang memenuhi aspek-aspek berikut:
 - 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, dan mudah digunakan,
 - 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
 - 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem;
 - 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan;
 - 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.
- j. pelaksanaan tracer study alumni:

- 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT;
- 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi;
- 3) ditargetkan pada seluruh populasi;
- 4) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

3.5.2. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya kepuasan dan reputasi hasil pendidikan dan pengajaran;
- b. bertambahnya jumlah prestasi mahasiswa dibidang akademik maupun non-akademik;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai meningkatnya kepuasan dan reputasi hasil pendidikan dan pengajaran yaitu:

- a. meningkatkan kualitas calon mahasiswa melalui:
 - 1) seleksi mahasiswa baru menerapkan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran;
 - 2) meningkatkan animo pendaftar yang ditunjukkan dengan peningkatan trend;
 - 3) adanya mahasiswa asing;
- b. peningkatan kualitas kurikulum:
 - 1) evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu, industri, asosiasi, organisasi profesi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna;
 - 2) capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna;
 - 3) struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan;

- 4) terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
 - 5) dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten;
- c. perbaikan dan pengembangan metode dan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
 - d. pembelajaran berbasis RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, project/problem based learning, OBE (outcome based education) atau istilah lainnya;
 - e. keterlibatan praktisi dalam pembelajaran;
 - f. peningkatan kerjasama dengan industri & masyarakat untuk magang, perekrutan alumni, pengajar dari unsur praktisi, kuliah tamu, penelitian, pengembangan sarana prasarana dan lainnya;
 - g. pemutakhiran dan perawatan sarana dan prasarana.
 - h. sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
 - i. penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
 - j. integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran;
 - k. pengukuran kepuasan mahasiswa yang memenuhi aspek-aspek berikut:
 - 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, dan mudah digunakan,
 - 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
 - 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem;
 - 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan;
 - 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai bertambahnya jumlah prestasi mahasiswa dibidang akademik maupun non-akademik yaitu:

- a. menyediakan layanan, sarana, dan prasarana kemahasiswaan di bidang:
 - 1) penalaran, minat dan bakat;
 - 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan
 - 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.
- b. melakukan secara rutin program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, seperti kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku dan lainnya;
- c. menyediakan anggaran untuk kegiatan mahasiswa;
- d. memberikan reward untuk mahasiswa dan pembimbing/pembinanya yang mempunyai prestasi;
- e. integrasi kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian proses pendidikan terutama pengembangan soft-skill;

3.5.3. Meningkatkan Peringkat Akreditasi Institusi dan Program Studi

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan meningkatnya peringkat akreditasi institusi dan program studi adalah sebagai berikut:

- a. peringkat akreditasi institusi dan seluruh program studi “Unggul” dan ada program studi yang memperoleh Akreditasi Internasional;
- b. terlaksananya good-practices penjaminan mutu yang meningkatkan daya saing dan menumbuh-kembangkan budaya mutu.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai peringkat akreditasi institusi dan seluruh program studi “Unggul” dan ada program studi yang memperoleh Akreditasi Internasional yaitu:

- a. penyusunan perencanaan penyiapan dokumen akreditasi (1-2 tahun sebelum pengajuan);
- b. penyelarasan dokumen sistem penjaminan mutu internal dan kontrak kerja dengan instrumen akreditasi;
- c. penyusunan data-data instrumen dan dokumen akreditasi berbasis IT;
- d. gap analysis kondisi yang ada untuk pencapaian nilai akreditasi “Unggul”;
- e. evaluasi dan audit mutu internal berbasis pada instrumen akreditasi;
- f. audit mutu internal dilakukan secara rutin;

- g. penyusunan kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk menutup gap kekurangan dan memenuhi penilaian instrumen akreditasi;
- h. pelaksanaan kegiatan untuk menutup gap kekurangan;
- i. penyediaan anggaran dan kegiatan penyusunan dokumen akreditasi dan pelaksanaan penilaian akreditasi oleh penilai external.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai terlaksananya *good-practices* penjaminan mutu yang meningkatkan daya saing dan menumbuhkan-budaya mutu yaitu:

- a. memiliki dokumen sistem penjaminan mutu yang baik dan lengkap;
- b. penyelarasan dokumen sistem penjaminan mutu internal dan kontrak kerja dengan instrumen akreditasi;
- c. audit mutu internal dilakukan secara rutin;
- d. secara rutin melaksanakan rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi:
 - 1) hasil audit mutu internal,
 - 2) umpan balik,
 - 3) kinerja proses dan kesesuaian produk,
 - 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,
 - 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya,
 - 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan
 - 7) rekomendasi untuk peningkatan.
- e. penyusunan kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan hasil audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen;

3.5.4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- a. terpenuhinya jumlah kebutuhan dan kualifikasi SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bertambahnya jumlah dosen yang berpendidikan S3 dan fungsional Lektor Kepala;
- c. terlaksananya proses pengelolaan administrasi dengan baik dan berkualitas;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai terpenuhinya jumlah kebutuhan dan kualifikasi SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

- a. mengusulkan formasi ASN untuk seluruh level dan jabatan;
- b. melakukan sertifikasi profesi dan pelatihan untuk tenaga kependidikan sesuai dengan tugas tanggung-jawabnya;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai bertambahnya jumlah dosen yang berpendidikan S3 dan fungsional Lektor Kepala yaitu:

- a. peningkatan kemampuan berbahasa asing para dosen;
- b. penyediaan anggaran untuk test TOEFL, IELTS atau bahasa asing lainnya sebagai persyaratan studi lanjut;
- c. menyediakan anggaran untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. memberikan reward untuk para dosen yang dapat menghasilkan output penelitian dan/atau pengabdian berupa buku ber-isbn, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, seminar internasional, hak cipta, paten, paten sederhana atau bentuk lainnya;
- e. memberikan reward untuk para dosen ber-prestasi dibidang akademik dan rekognisi lainnya;
- f. penyediaan penerbitan jurnal terakreditasi, penerbitan buku, dan sentra HKI;
- g. penyediaan sistem informasi online untuk penyimpanan dan publikasi hasil karya para dosen seperti repository dan lainnya;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai terlaksananya proses pengelolaan administrasi dengan baik dan berkualitas yaitu:

- a. pelatihan dan peningkatan kemampuan pegawai dalam pengolahan data berbasis teknologi informasi;
- b. pemanfaatan teknologi IT dalam proses administrasi;
- c. penyelesaian kewajiban seluruh laporan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar layanan minimum atau standar operating procedure untuk seluruh layanan di semua unit;
- e. memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong good university governance, yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;

3.5.5. Meningkatkan Kualitas dan Keluaran Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan meningkatnya kualitas dan keluaran program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya jumlah dan kualitas karya ilmiah;
- b. meningkatnya pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai meningkatnya jumlah dan kualitas karya ilmiah yaitu:

- a. menyediakan anggaran untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. memberikan reward untuk para dosen yang dapat menghasilkan output penelitian dan/atau pengabdian berupa buku ber-isbn, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, seminar internasional, hak cipta, paten, paten sederhana atau bentuk lainnya;
- c. memberikan reward untuk para dosen ber-prestasi dibidang akademik dan rekognisi lainnya;
- d. penyediaan penerbitan jurnal terakreditasi, penerbitan buku, dan sentra HKI;
- e. pelatihan atau sosialisasi tata cara penulisan ilmiah untuk buku, artikel atau paten;
- f. penyediaan sistem informasi online untuk penyimpanan dan publikasi hasil karya para dosen seperti repository dan lainnya;
- g. meningkatkan kerjasama dengan industri dalam program penelitian;
- h. meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain;
- i. pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai meningkatnya pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu:

- a. menyusun roadmap (rencana induk) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengembangan materi pembelajaran dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. pengembangan profit-sharing hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi komersialisasi;
- e. penyediaan sistem informasi online untuk penyimpanan dan publikasi hasil karya para dosen seperti repository dan lainnya;
- f. pengembangan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan hasil akhir;
- g. menyediakan anggaran untuk tata kelola program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. pengembangan tata kelola laboratorium dalam rangka hilirisasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3.5.6. Meningkatkan Tata Kelola Yang Baik Dan Berkualitas Sebagai Perwujudan Good University Governance

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan meningkatnya tata kelola yang baik dan berkualitas sebagai perwujudan Good University Governance adalah sebagai berikut:

- a. tata kelola yang baik dan berkualitas yang dibuktikan dengan terselesaikannya semua kewajiban pelaporan dan administrasi lainnya;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tata kelola yang baik dan berkualitas yaitu:

- a. pemanfaatan teknologi IT dalam proses administrasi;
- b. penyelesaian kewajiban seluruh laporan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- c. menyusun standar layanan minimum atau standar operating procedure untuk seluruh layanan di semua unit;
- d. memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong good university governance, yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil;
- e. memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi;
- f. memperkuat penilaian kinerja berbasis output atau outcome;
- g. penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;
- h. pengukuran kepuasan pengguna layanan yang memenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, dan mudah digunakan,
 - 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
 - 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem;
 - 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan;
 - 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.
- i. Persiapan menuju otonomi pengelolaan lembaga menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan Berbadan Hukum (PTNBH);
 - j. terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

3.6. Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi

Penerapan kebijakan diferensiasi misi perguruan tinggi penting dilakukan untuk memastikan setiap institusi mengembangkan peran sesuai keunggulan dan karakteristiknya, sehingga sistem pendidikan tinggi lebih efektif, mampu mencetak lulusan yang kompetitif di pasar kerja, relevan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, serta memiliki daya saing global. Dalam menetapkan diferensiasi misi perguruan tinggi perlu mempertimbangkan keunggulan wilayah dan sektor prioritas masing-masing.

Sejalan dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045, diferensiasi misi perguruan tinggi akan dibagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

a. Perguruan Tinggi Berorientasi Pengajaran (Teaching University)

Perguruan tinggi berorientasi pengajaran diarahkan untuk memprioritaskan fungsi utama dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik kuat.

b. Perguruan Tinggi Vokasi (Vocational University)

Perguruan tinggi vokasi memiliki mandat khusus untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasar kerja secara langsung. Institusi ini diposisikan sebagai pusat pengembangan keterampilan teknis yang aplikatif.

c. Perguruan Tinggi Riset (Research University)

Perguruan tinggi riset akan didorong untuk menjadi pusat unggulan dalam riset dan inovasi dengan reputasi internasional yang kuat. Perguruan tinggi ini diharapkan menjadi lokomotif dalam transformasi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Masing-masing perguruan tinggi dapat memilih dan menetapkan fokus misi dan pengembangan sesuai dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki serta peluang yang ingin diraih. Kemdiktisaintek akan memfasilitasi dengan mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan institusinya sesuai misi yang dipilih, mengaitkan indikator kinerja perguruan tinggi dengan misi, dan memberi insentif perguruan tinggi yang mengembangkan keunggulan sejalan dengan misi yang dipilih.

Selain itu, beberapa perguruan tinggi negeri akan didorong untuk mengembangkan institusinya menjadi perguruan tinggi riset dan berfungsi sebagai pusat inovasi untuk menjawab kebutuhan pengembangan teknologi dan industri nasional. Pola pengembangan akan mengikuti model *apex universities* sebagaimana telah berhasil dikembangkan di China dan Malaysia.

Aspek mutu dan relevansi pendidikan tinggi utamanya akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pembangunan lokal dan/atau nasional, sehingga keberadaan perguruan tinggi harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Posisi perguruan tinggi pada pemeringkatan global bukanlah merupakan tujuan pengembangan, melainkan sebagai dampak atas peningkatan mutu dan relevansinya pada peningkatan daya saing global.

3.7. Transformasi Pendidikan Tinggi Vokasi

Keberadaan politeknik sebagai salah satu pendidikan tinggi vokasi masih menghadapi tantangan struktural, regulasi, dan persepsi publik yang menghambat kemajuan kelembagaan, kolaborasi riset, serta daya saing di tingkat lokal maupun internasional. Karena itu, diperlukan transformasi kelembagaan politeknik yang diarahkan untuk meningkatkan adaptabilitas, memperluas otonomi, dan memastikan relevansi pendidikan vokasi terhadap kebutuhan industri dan masyarakat.

Transformasi kelembagaan politeknik diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi politeknik untuk menyelenggarakan pendidikan hingga jenjang magister dan doktor terapan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, melalui transformasi kelembagaan, politeknik akan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan portofolio riset terapan yang lebih luas, membentuk unit inovasi seperti teaching factory dan techno-park, serta memperkuat kemitraan lintas sektor di tingkat nasional maupun internasional.

Pelaksanaan transformasi kelembagaan politeknik perlu diawali dengan kajian komprehensif untuk memastikan kebutuhan dan arah transformasi yang tepat. Hasil kajian akan menjadi dasar sehingga implementasi transformasi kelembagaan benar-benar memberikan dampak peningkatan kapasitas kelembagaan dan berkontribusi strategis terhadap pendidikan vokasi nasional.

Salah satu yang dapat didorong sebagai bagian transformasi kelembagaan politeknik adalah peralihan status dari satuan kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU), dan selanjutnya menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum (PTN BH). Dalam proses ini, fleksibilitas dalam hal otonomi akademik, pengelolaan sumber daya manusia, dan keuangan menjadi faktor kunci dalam mendorong kemajuan politeknik di masa mendatang. Strategi peralihan status politeknik menjadi PTN BH mengikuti strategi revitalisasi perguruan tinggi negeri. Dengan menjadi PTN BH, maka politeknik akan memiliki otonomi dan fleksibilitas pengelolaan, sumber pendanaan yang beragam, kualitas pendidikan dan fasilitas yang lebih tinggi, peluang kolaborasi internasional, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.

3.8. Transformasi PTN Satker menjadi PTN BLU

Percepatan perubahan status PTN Satker menjadi PTN BLU dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas, kualitas sarana dan prasarana, serta tata kelola PTN Satker. Upaya ini bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu layanan akademik sekaligus mempersiapkan PTN Satker agar siap beralih ke PTN BLU. Selama proses ini, PTN Satker akan bermitra dengan PTN BH.

Skema ini diarahkan pada peningkatan kualitas Tridharma, pengembangan SDM, pengembangan institusi serta difokuskan untuk peningkatan kapasitas manajemen PTN Satker dengan pendampingan oleh PTN BH. Ruang lingkup pendampingan/pembinaan PTN Satker oleh PTN BH adalah sebagai berikut:

1. Membantu melakukan pemetaan kelemahan dan keunggulan PTN Satker;
2. Membantu menyusun rencana pengembangan institusi dan peta jalan transformasi ke PTN BLU;
3. Membantu merancang strategi dan program PTN Satker untuk peningkatan mutu Tridharma perguruan tinggi dan tata kelola sehingga siap bertransformasi; dan
4. Melakukan pendampingan implementasi strategi dan program PTN Satker dalam peningkatan kapasitas, mutu Tridharma dan penyiapan menjadi PTN BLU.

Pemilihan PTN BH pembina dilakukan oleh PTN Satker dan PTN BH melalui FGD yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Satu PTN Satker hanya dapat dibina oleh satu PTN BH. Sementara satu PTN BH dapat membina maksimum dua PTN Sakter.

BAB IV. Target dan Indikator Kinerja

Target dan Indikator kinerja dibagi menjadi Target dan Indikator Kinerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Indikator Kinerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

4.1. Target dan Indikator Kinerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemdiktisaintek serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, maka Kemdiktisaintek menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP).

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Kinerja Kemdiktisaintek 2025-2029

	Tujuan/ Indikator Tujuan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T1	Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu						
IT1	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	11,11	11,49	11,88	12,28	12,68
T2	Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi						
IT2	Persentase pekerja lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah-tinggi	%	62,97	63,60	64,23	64,88	65,53
T3	Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing						
IT3	Peringkat Indeks Inovasi Global	Peringkat	53	52	51	50	49
T4	Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IT4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	89,13	89,13	89,37	89,62	89,87

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, Kemdiktisaintek memiliki Sasaran Strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Adapun rincian masing-masing sasaran strategis untuk periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kemdiktisaintek 2025-2029

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
SS1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas							
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT)	%	33,94	34,92	35,93	36,97	38,04	
SS 2	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi							
IKSS 2.1	Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (a) total; (b) karyawan atau wirausaha	%	a) 62,16 b) 83,59	(a) 62,95 (b) 84,22	(a) 63,75 (b) 84,88	(a) 64,56 (b) 85,57	a) 65,37 b) 86,31	
IKSS 2.2	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang bekerja di bidang sesuai pendidikan dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	44,88	46,38	47,89	49,39	50,9	
SS 3	Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi							
IKSS 3.1	Jumlah SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) per juta penduduk	Orang	1267	1292	1318	1344	1371	
IKSS 3.2	Jumlah SDM pendidikan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional	Orang	99	103	107	111	116	
SS 4	Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi							
	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat <i>THE Impact Rankings SDGs</i> : (a) Top 300 (b) Top 600 (c) Top 1000	PT	(a) 8 (b) 12 (c) 22	(a) 8 (b) 13 (c) 23	(a) 8 (b) 13 (c) 23	(a) 8 (b) 14 (c) 24	(a) 9 (b) 15 (c) 25	
SS 5	Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset							
IKSS 5.1	Jumlah perumusan kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berbasis riset	Dokumen	5	6	8	10	13	
SS 6	Meningkatnya tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel							
IKSS 6.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	89,13	89,37	89,62	89,87	90,1	

Sementara itu, dalam mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, Kemdiktisaintek memiliki Sasaran Program yang dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Adapun rincian masing-masing sasaran program untuk periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kemdiktisaintek
2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan berkembangnya STEAM di pendidikan tinggi	Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya)
	Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31%
	Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas
	Proporsi mahasiswa baru berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul
Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM
	Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul
	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan
Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: (a) bekerja (b) berwirausaha
Meningkatnya kualifikasi dan pengelolaan SDM pendidikan tinggi	Persentase dosen berkualifikasi S3 (a) total (b) STEM (c) Non-STEM
	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor / lektor kepala / guru besar
Meningkatnya SDM pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi tingkat internasional	Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa
	Jumlah SDM pendidikan tinggi yang melakukan penelitian dengan bekerja sama dengan institusi lain di tingkat internasional
Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi berdasarkan keunggulan	Jumlah Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI-PT) yang terpetakan berdasarkan keunggulan komoditas penelitiannya
	Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya
Meningkatnya peran lembaga di perguruan tinggi dalam layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	Jumlah penerimaan <i>Science Techno Park</i> (STP) berbasis iptek dan inovasi
Meningkatnya kualitas keluaran riset yang berdampak	Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia: (a) rasio sitasi; (b) h-index
	Jumlah paten <i>granted</i> dari perguruan tinggi
Meningkatnya kualitas kebijakan terkait pendidikan tinggi, riset pengembangan, sains teknologi yang berdampak	Jumlah kebijakan pendidikan tinggi yang telah disahkan
	Jumlah kebijakan riset dan pengembangan yang telah disahkan
Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Persentase lulusan program studi PPG terakreditasi unggul
	Jumlah talenta sains dan teknologi yang berprestasi di tingkat internasional bidang sains dan teknologi

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya SDM pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi tingkat internasional	Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri
Meningkatnya peran lembaga di perguruan tinggi dalam layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI / masyarakat
Meningkatnya kualitas kebijakan terkait pendidikan tinggi, riset pengembangan, sains teknologi yang berdampak	Jumlah kebijakan sains dan teknologi yang telah disahkan
Meningkatnya tata kelola Kementerian yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Indeks Pembangunan Statistik
	Indeks Sistem Merit
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Indeks Tata Kelola Pengadaan
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal
	Predikat SAKIP Kementerian
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal
	Persentase kerja sama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
	Opini BPK RI atas laporan keuangan
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemdiktisaintek
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal
	Jumlah Satker di lingkungan Kemdiktisaintek yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi

4.2. Target dan Indikator Kinerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

Indikator Kinerja diturunkan dari Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang telah ditetapkan untuk Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	PIC
1.	Talenta	IKU 1	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)							
			c. D3*	%	91,6	92	92	82	82	BAKK
			d. D4	%	80,5	82	82	82	82	
			Persentase mahasiswa internasional	%	0	0	0	0	ada	
		IKU 2	Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/ berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	65,3	70	75	80	80	UPA PKW
2a	Inovasi	IKU 3	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi	%	24,2	25	25	25	25	BAKK
		IKU 5	Persentase luaran hasil kerjasama antara PT dan start-up /industri/Lembaga	%	4,4	5	5	5	5	BAKK
			Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)							P3KM
			Total publikasi bereputasi internasional	Artikel	18	5	10	10	10	
			a. Persentase publikasi Top Tier	%	50	50	50	50	50	
			b. Persentase publikasi Q1	%	33,3	10	10	10	10	
			Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%	55,6	10	10	10	10	
2b.	Kontribusi pada Masyarakat	IKU 7	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	70	75	75	75	75	Jurusan
			Peringkat PT pada <i>QS World University Ranking</i>	Peringkat	NA	NA	NA	NA	NA	
			Peringkat PT pada <i>THE Impact Ranking</i>	Peringkat	NA	NA	NA	NA	NA	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	PIC
3	Tata Kelola berintegritas	IKU 9	Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan	%	0,102	0,1	0,15	0,2	0,2	
			Persentase pendapatan terhadap total aset	%	9,13	9,59	10	10	10	
			a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (grant pemerintah/LPDP)	%	5,31	5,31	5,5	5,5	5,5	P3KM
			b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%	0	5	6,5	8	10	UPA PTPU
			c. Dana abadi terhadap total aset	%	0	0	0	0	0	
			Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan:							
			a. Riset	%	1,83	5	5	5	5	P3KM
			b. <i>Upskilling</i> dan <i>upgrading</i> dosen	%	1,98	5	5	5	5	BAPKU
			c. <i>Updating</i> laboratorium	%	6,03	10	10	10	10	Jurusan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Pilihan		Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	PIC
1.	Talenta	IKU 4	Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional	%	14,75	10	10	15	15	Jurusan
			Persentase dosen berpendidikan S3	%	5,7	6	6	6	8	Jurusan
2.	Kontribusi pada Masyarakat	IKU 8	Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	5	5	5	6	6	P3KM
3.	Tata Kelola berintegritas	IKU 10	Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM	Unit Kerja	1	1	1	1	1	SPI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Pilihan		Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	PIC
		IKU 11	a. Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BAPKU
			b. Predikat SAKIP perguruan tinggi	Nilai	BB	BB	A	A	AA	BAPKU
			c. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	Jumlah	0	0	0	0	0	komite
			d. Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi	%	100	100	100	100	100	Satgas

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Partisipatif	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	PIC
1.	Tata Kelola berintegritas	Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN dan LHKPN tepat waktu	%	90	90	90	90	90	BAPKU

Tabel 4.5 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama PTN

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
1	IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi	- Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu adalah jumlah mahasiswa pada suatu tahun akademik yang berhasil lulus tepat waktu (sesuai ketentuan masa studi prodi: S1 = 4 tahun, S2 = 2 tahun, S3 = 3–4 tahun, D3 = 3 tahun, dan Program Profesi mengikuti masa tempuh kurikulum, dst.). - Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut.	$(1) AEE = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu}}{\text{Total mahasiswa aktif}} \times 100\%$ $(2) \text{Tingkat Pencapaian AEE} = \frac{AEE \text{ Realisasi}}{AEE \text{ Ideal}} \times 100\%$ $(3) AEE \text{ PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$ Dimana: <i>i</i> = tingkat pendidikan (misalnya D3, S1, S2, S3, dan seterusnya) <i>n</i> = jumlah jenjang pendidikan yang dihitung	PDDikti

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		3. Mahasiswa TepatWaktu adalah mahasiswa yang lulus sesuai masa studi standar program. 4. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (drop out), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan, atau jumlah mahasiswa yang belum lulus. AEE Ideal: D3 = 33% S1 = 25% S2 = 50% S3 = 33%	Tingkat Pencapaian AEE i = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada jenjang ke-i Contoh Perhitungan Diketahui: AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30% AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20% AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45% AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30% Tingkat pencapaian AEE D3 = $30\%/33\% = 90,91\%$ Tingkat pencapaian AEE S1 = $20\%/25\% = 80,00\%$ Tingkat pencapaian AEE S2 = $45\%/50\% = 90\%$ Tingkat pencapaian AEE S3 = $30\%/33\% = 90,91\%$ AEE PT = $90,91\% + 80\% + 90\% + 90,91\% / 4 = 87,95\%$	
2	IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan	Indikator ini mengukur persentase lulusan pendidikan tinggi (akademik, vokasi, dan profesi) yang memiliki aktivitas produktif berupa bekerja, melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, atau berwirausaha dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah kelulusan, berdasarkan hasil <i>tracer study</i> yang terverifikasi oleh perguruan tinggi dan terekam dalam sistem pelaporan nasional PDDikti atau <i>Tracer Study</i>. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan ($\geq 50\%$ responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja). Mendapatkan pekerjaan dengan beberapa kategori dengan bobot masing-masing sebagai berikut;	<i>Lulusan S1 dan program diploma yang berhasil dapat pekerjaan (A), melanjutkan studi (B), atau menjadi wiraswasta (C) / Total jumlah lulusan S1 dan Program Diploma dalam satu periode</i> $\times 100$	Tracer Study

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		- Masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 10) - Masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 6) - Masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 4) Perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.) Perusahaan nirlaba Institusi/organisasi multilateral Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD atau sudah berpenghasilan >1.2X UMP sebelum lulus, bekerja <i>part-time</i> atau magang di perusahaan dalam kategori diatas.		
3	IKU 3: Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi	Indikator ini mengukur persentase mahasiswa aktif jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D4/D3/D2/D1) yang mengikuti kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, kewirausahaan, atau kompetisi di luar program studinya, baik di lingkungan internal maupun eksternal perguruan tinggi, serta meraih prestasi yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi, lembaga nasional, atau internasional dalam periode tertentu. Lulusan yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan SKS dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan IKU Diktisaintek Berdampak. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: Magang atau praktek kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun Perusahaan rintisan/ <i>startup</i> (bagi prodi vokasi yang sudah punya program magang wajib, tidak dapat dihitung).	<i>Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan pengalaman + pengakuan SKS di luar kampus (A) + meraih prestasi minimal tingkat nasional (B)</i> Dibagi <i>Total jumlah mahasiswa x 100</i>	BAKK, P3KM

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		Program Mahasiswa Berdampak: Program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti Kompetisi atau lomba yang minimal tingkat provinsi, nasional dan internasional, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala prodi.		
4	IKU4: Jumlah Dosen Perguruan Tinggi yang Mendapatkan Rekognisi Internasional	Indikator ini mengukur jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang memperoleh rekognisi atau pengakuan ditingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau kontribusi keilmuan, yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari lembaga, asosiasi, atau institusi luar negeri yang kredibel dalam periode pelaporan tertentu. Karya Tulis Ilmiah Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik Karya rujukan: Handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)	Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional / <i>Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu periode</i>	P3KM
5	IKU5: Rasio Luaran Hasil Kerjasama Antara Perguruan Tinggi dan Start-Up/ Industri/ Lembaga	Indikator ini mengukur rasio antara jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dengan startup, industri, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, atau lembaga internasional terhadap jumlah total kerjasama yang dilaksanakan dalam periode tertentu.	Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start-up dibagi total dosen PT x 100%	P3KM

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		Karya Tulis Ilmiah: Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi Karya rujukan kolaborasi: Handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus Karya Terapan: Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi Pengembangan invensi dengan mitra		
6	IKU 6: Persentase Publikasi Bereputasi Internasional (Scopus/WoS)	Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (Scopus dan/atau Web of Science) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut: Jurnal Q1 : bobot 1,00 Jurnal Q2 : bobot 0,75 Jurnal Q3 : bobot 0,50 Jurnal Q4 : bobot 0,25 Publikasi pada prosiding internasional yang terindeks Scopus atau WoS bobot sebesar 0,25. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional (dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri) memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi. Publikasi bereputasi yang diperhitungkan meliputi: Artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks Scopus/WoS, terutama bidang terapan: Artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (applied science journals); Publikasi hasil kerja sama riset dengan industri atau mitra profesi	$\text{Nilai Bobot Publikasi} + \text{Nilai Bonus Kolaborasi dari publikasi terindeks Scopus/WoS} / \text{total publikasi PT} \times 100\%$	P3KM

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		PT Vokasi Publikasi bereputasi yang diperhitungkan meliputi: Artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks Scopus/Wos, terutama bidang terapan: Artikelpada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (<i>applied science journals</i>); Publikasi hasil kerja sama riset dengan industri atau mitra profesi		
7	IKU 7: Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	Indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), dan SDG 17 (Partnership for the Goals) bersifat wajib, serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi. Ruang Lingkup Kegiatan yang dimasukkan dalam perhitungan IKU Kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup: • Pendidikan: kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs. • Penelitian: proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs. • Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs. • Kerja Sama dan Kemitraan: kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs.	Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDGs dibagi total program kegiatan Tri Dharma PT x 100%	BAKK

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		• Inisiatif Institusional: kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs. Ketentuan SDGs yang Wajib dan Pilihan • Wajib: 1. SDG 1 (No Poverty/Tanpa Kemiskinan) 2. SDG 4 (Quality Education/Pendidikan Berkualitas) 3. SDG 17 (Partnerships for the Goals/Kemitraan)		
8	IKU 8: Jumlah SDMPerguruan Tinggi (Dosen/Peneliti) yang Terlibat Langsung dalam Penyusunan Kebijakan (Nasional/Daerah/Industri)	Indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu. Ruang Lingkup SDM: Dosen tetap dan tidak tetap perguruan tinggi. Peneliti yang ada di perguruan tinggi. Bentuk Keterlibatan yang Diakui: Anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri. Narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan. Kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi. Saksi Ahli dalam pengadilan (PTUN, MK, MA, PN, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Lingkungan/Perdata). Jenis Kebijakan yang Dimaksud: Kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian). Kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah).	Jumlah <i>SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan (nasional atau daerah atau industri)</i> dibagi total SDM PT x 100%	Jurusan, BAKK, UPA PTPU, P3KM

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		Kebijakan atau regulasi di tingkat industri/ sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis). Syarat Validasi: Dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM PT. Keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).		
9	IKU 9: Persentase Pendapatan Non Pendidikan/UKT	Indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu 1. Ruang Lingkup Pendapatan Non Mahasiswa yang Diakui: • Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset. • Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.). • Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi,	Jumlah realisasi pendapatan non mahasiswa dibagi total pendapatan PT x 100%	BAPKU

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi. 2. Tidak Termasuk: • SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. • Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler). • Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 3. Periode Pengukuran: • Tahunan (1 tahun anggaran). 4. Syarat Validasi: • Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (BPK untuk PTN, auditor independen untuk PTS). • Dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan non mahasiswa.		
10	IKU 10: Jumlah Usulan Zona Integritas – WBK/WBBM	Indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau fakultas/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu. Usulan yang dihitung adalah usulan yang telah memenuhi ketentuan dan melewati tahapan penilaian awal (passing grade) sesuai dengan Pedoman Pembangunan Zona Integritas yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB.	Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas Perguruan Tinggi dalam Satu Periode	SPI
11	IKU 11: Opini WTP Atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi (A)	Indikator yang mengukur capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang atas laporan keuangan perguruan tinggi, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan	Opini WTP atas laporan Keuangan PT	BAPKU

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Subyek yang dinilai: Perguruan tinggi negeri (PTN) dengan laporan keuangan yang diaudit oleh BPK atau auditor independen terdaftar. Perguruan tinggi swasta (PTS) dengan laporan keuangan yang diaudit auditor independen terdaftar. Jenis Opini yang Diakui: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian): dinilai sebagai capaian penuh. WDP (Wajar Dengan Pengecualian): dinilai capaian parsial. Periode Penilaian: Satu tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi. Syarat Validasi: Adanya laporan audit resmi dari BPK atau auditor independen. Opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan.		
12	IKU 11: Predikat SAKIP Perguruan Tinggi (B)	Indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (outcome). Skala dan Predikat Penilaian; Nilai Akhir Predikat SAKIP Makna	Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan	BAPKU

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		90 – 100 AA (Memuaskan) Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan. 80 – 89 A (Sangat Baik) Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target. 70 – 79 BB (Baik) Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan. 60 – 69 B (Cukup Baik) Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten. < 60 CC–C (Kurang) Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP. Syarat Validasi: Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB. Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek. Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.		
13	IKU 11: Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik (C)	Indikator ini mengukur jumlah laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima dan tercatat secara resmi melalui sistem aplikasi Anjani (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) atau sistem pelaporan internal perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Anjani dalam periode tertentu. Jenis Pelanggaran Integritas Akademik; Meliputi antara lain plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, penyalahgunaan karya ilmiah, dan pelanggaran etika publikasi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Syarat Validasi: Hanya laporan yang masuk dan terverifikasi dalam sistem Anjani (dengan bukti tiket laporan, status	Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada Tahun Berjalan	Komite Integritas

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		verifikasi, atau hasil tindak lanjut) yang dihitung sebagai data valid untuk indikator ini. Laporan pelanggaran diverifikasi oleh unit penegakan integritas akademik (misalnya: satgas etik, komisi etik, atau unit pengendalian mutu akademik).		
14	IKU 11: Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi (D)	Indikator ini mengukur jumlah laporan dugaan pelanggaran kekerasan yang diterima dan tercatat secara resmi melalui sistem pelaporan internal perguruan tinggi dalam periode tertentu.	Jumlah Laporan Pelanggaran kekerasan pada Tahun Berjalan	Satgas PPKPT
15	IKU 12: Persentase pegawai yang melaporkan LHKASN dan LHKPN tepat waktu	Indikator ini mengukur persentase pegawai yang telah melaporkan LHKPN pada waktu yang telah ditetapkan	Jumlah pegawai yang telah melaporkan tepat waktu dibagi seluruh pegawai yang wajib lapor x 100%	BAPKU

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (tambahan dari IKU PTN)

Sasaran	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Final Target	PIC
SPB 1. Meningkatkan APK, kualitas dan jumlah lulusan	Bertambahnya Gedung baru	√	√	√	√	√	√	
	Bertambahnya program studi baru	√	√	√	√	√	√	Jurusan
	Jumlah Mahasiswa baru setiap tahun	≥ 560	≥ 600	≥ 800	≥ 920	≥ 980	≥ 1000	BAKK
	Program studi Pascasarjana	-	-	-	-	-	√	
SPB 2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	UPA UKOM
	Rata-rata IPK lulusan	≥ 3.25	≥ 3.25	≥ 3.25	≥ 3.25	≥ 3.25	≥ 3.25	Jurusan
	Persentase lulusan bekerja ≤ 6 bulan	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	UPA PKW
	Persentase mahasiswa berprestasi tingkat nasional	≥5%	≥5%	≥5%	≥5%	≥7%	≥10%	BAKK
SPB 3. Meningkatkan	Akreditasi Institusi	Baik	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	P2MPP

Sasaran	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Final Target	PIC
peringkat Akreditasi Institusi dan Program Studi	Persentase prodi lama terakreditasi Unggul	≥ 67%	≥ 67%	≥ 67%	≥ 67%	100%	100%	P2MPP
	Akreditasi Internasional					√	√	P2MPP
SPB 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase dosen berkualifikasi S3	5%	5%	8%	10%	10%	≥ 50%	Jurusan
	Persentase dosen dengan kepangkatan LK & Guru Besar	0,8%	16,4%	16,4%	24,5%	24,5%	≥ 30%	Jurusan
SPB 5. Meningkatkan Kualitas dan Keluaran Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Persentase jumlah kegiatan penelitian yang memperoleh dana hibah diluar Institusi dari seluruh jumlah dosen	≥5%	≥5%	≥5%	≥7%	≥7%	≥ 15%	P3KM
	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh dana hibah diluar Institusi dari seluruh jumlah dosen	≥5%	≥5%	≥5%	≥7%	≥7%	≥ 15%	P3KM
	Persentase jumlah dosen yang menulis artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4, artikel jurnal internasional, buku ber-isbn, paten/paten sederhana, Hak Cipta, conference terindex scopus setiap tahun	≥40%	≥40%	≥50%	≥50%	≥60%	≥80%	P3KM
	Peringkat Jurnal yang dikelola	Sinta 4	Sinta 4	Sinta 3	Sinta 3	Sinta 2	Scopus	P3KM
	Klaster perguruan tinggi	Madya	Madya	Madya	Madya	Mandiri	Mandiri	P3KM
Meningkatkan tata kelola yang baik dan berkualitas sebagai perwujudan Good University Governance	Memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)	-	-	√	√	√	√	SPI
	Memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	-	-	-	√	√	SPI

Sasaran	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Final Target	PIC
	Memperoleh status hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	√	√	√	√	√	√	BAPKU
	Status pengelolaan tata Kelola Perguruan Tinggi	satker	satker	satker	satker	BLU	PTNBH	Seluruh unit
	Rata-rata predikat SAKIP	BB	BB	A	A	A	AA	BAPKU
	Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL	≥93	≥93	≥93	≥93	≥93	≥93	BAPKU

Cat: √ : ada/tercapai/terlaksana/memenuhi

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 500/M/2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen Dan Kriteria Publikasi Ilmiah.

Direktur,

I Made Andik Setiawan, M.Eng., Ph.D.
NIP. 197307032012121003

